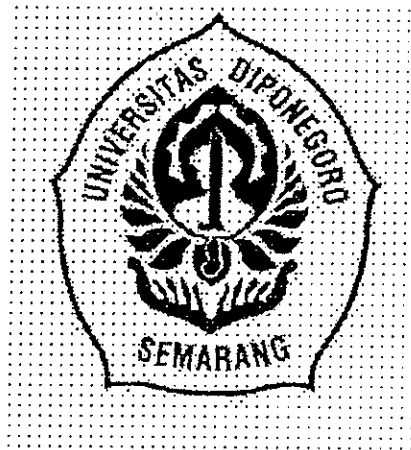


**PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA  
MASYARAKAT JAWA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA  
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**Tesis**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :

**NUR HAYUNINGSIH**  
**NIM. B4B001172**

**Pembimbing**  
**Prof. I.G.N Sugangga, S.H.**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/ tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan Daftar Pustaka.

Semarang, November 2003

( NUR HAYUNINGSIH )

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA  
MASYARAKAT JAWA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA  
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**TESIS**

Oleh :

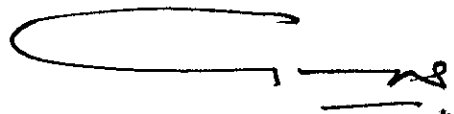
**NUR HAYUNINGSIH**  
**NIM. B4B001172**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal Januari 2004  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima

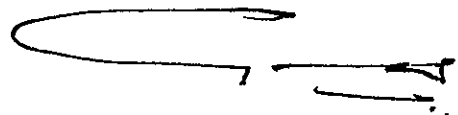
Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Ketua Program  
Magister Kenotariatan



**Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH**  
**NIP. 130 359 063**



**Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH**  
**NIP. 130 359 063**

## MOTTO :

*Permudahlah oleh kalian urusan orang lain dan jangan mempersulit; berilah oleh  
kalian kabar gembira dan jangan membuat mereka takut  
(Rasulullah SAW)*

*Cinta tidak akan memberikan apapun selain dirinya sendiri  
Cinta tidak akan menuntut apapun kecuali cinta itu sendiri  
Cinta tidak memiliki dan tidak dimiliki  
sebab cinta hanya untuk cinta  
Jangan dikira bahwa cinta terbit dari kekariban dan kedekatan yang kukuh  
Cinta terbit dari benih keselarasan jiwa  
maka jika tidak pernah ada keselarasan jiwa,  
cinta tidak akan bersemi dalam hitungan tahun dan bahkan milenia  
(Kahlil Gibran)*

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini persembahkan khusus teruntuk :*

- *Suami terkasih*
- *Almarhum/ almarhumah Bapak dan Ibu*
- *Belahan jiwa "Daffa" cinta & harapkanmu*

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF ENDOWMENT BASED ON CUSTOMARY LAW AT JAVA SOCIETY BEFORE HEIR DIE IN SUB PROVINCE OF KARANGANYAR

By :

NUR HAYUNINGSIH  
NIM. B4B001172

The elements of heredity custom law still doing in Javanese public was inheriting process before the heir died, the heredity material components consist of the origine material and collective material, the widow as relative heir, the son and daughter have the same right to the material inheritance and the role of head village stay dominant in as judge of keeping the peace village, the adopted child state not as relative heir and heredity material was money from sale, consist of the origine material, unit thing, ingated rice field, home, unit thing of value.

Heredity custom law was still recognize have very important role in the life pattern the Javanese traditional custom, in Sub Province of Karanganyar the distribution of material inheritance both before and after the heir died because the heredity custom law was still recognize following the development of life in the Javanese public custom.

To know why the Javanese public custom in Sub Province of Karanganyar large a part them doing the inheriting before they died, they using the Sociology research methode. It will be know the applied of heredity law custom in the Javanese public in Sub Province of Karanganyar. The research about Javanese heredity custom law very important it to know whether the condition have influenced by the heredity Islamic law or heredity civil law.

## ABSTRAKSI

### PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh :

NUR HAYUNINGSIH  
NIM. B4B001172

Unsur-unsur hukum waris adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa adalah pewarisan yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, komponen harta warisan yang terdiri dari harta asal dan harta bersama, janda sebagai ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak sama terhadap harta warisan orang tua dan peranan kepada desa tetap dominan sebagai hukum perdamaian desa, sedangkan kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris dan harta warisan berwujud uang, uang hasil penjualan harta warisan, kesatuan benda, sawah, rumah, kesatuan benda yang dinilai dengan uang.

Hukum waris adat dianggap masih sangat berperan dalam pola kehidupan masyarakat adat Jawa di Kabupaten Karanganyar dalam pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia maupun setelah pewaris meninggal dunia, karena hukum waris adat dianggap selalu bisa mengikuti perkembangan kehidupan pada masyarakat adat Jawa.

Untuk mengetahui mengapa masyarakat adat Jawa di Kabupaten Karanganyar sebagian besar melakukan pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia maka dengan menggunakan metode penelitian empiris akan dapat diketahui penerapan hukum waris pada masyarakat Jawa di Kabupaten Karanganyar, penelitian tentang hukum waris adat Jawa dipandang perlu karena untuk mengetahui apakah sudah terpengaruh oleh hukum waris Islam maupun hukum waris perdata.

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis penatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul :

### **PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan pihak lain, tesis ini tidak mungkin terwujud. oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menghatirkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof, I.G.N. Sugangga, SH selaku ketua Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro sekaligus pembimbing yang telah memberikan izin dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Tjipto.S. Soeroso, SH selaku dosen wali yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis dari awal hingga selesainya masa studi.
3. Ibu dan Bapak Dosen pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas segala bimbingan dan telah memberikan tambahan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.



4. Bapak Camat Kecamatan Jaten Bapak Drs. Larmanto, Bapak Camat Kecamatan Kebakkramat Bapak I.G.N Triyanto,SH, Bapak Camat Kecamatan Colomadu Bapak Drs. Wahyudi,SH,MM yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam penyusunan tesis.
5. Suamiku terkasih Mas Dody, yang telah memberikan dorongan, doa dan segalanya “tanpamu aku bukanlah apa-apa” I Love you so ....
6. Almarhum Bapak yang telah pergi tuk selamanya tanggal 7 November 2003 “maafkanlah, dan terima kasih atas semua yang kau berikan, selamat jalan semoga Allah memberi Bapak taman surgawi yang indah.
7. Belahan jiwa, cinta dan harapanku “Daffa” Mom I love you heart life, my baby ...
8. Budhe Nuk, yang selalu saja tak repotin “semoga Allah memberimu kebahagiaan”
9. Sahabatku Rika, Rini, Endah, Dian, Titin, mbak Fahim, Adik-adik kost Nia, Sendi Dina, Lilis “kalian begitu baik dech”
10. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyelesaian penyusunan tesis ini.

“Hanya Allah pemilik segala kesempurnaan”

Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini, masih jauh dari sempurna baik dalam bentuk maupun isinya. untuk itu semua kririk membangun penulis akan menerima dengan lapang hati.

Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum waris adat di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 2003

Penulis

**Nur Hayuningsih**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	v
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Tesis .....	7
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Hukum Waris Adat.....	9
A.1. Unsur-unsur Hukum Waris Adat .....	13
A.1.1. Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat .....	16

A.1.2. Ahli Waris menurut Hukum Adat ..	22
A.1.3. Prinsip-prinsip pembagian Harta Warisan.....	25
A.1.4. Lembaga penggantian Tempat .....	49
A.2. Proses Pewarisan .....	51
A.2.1. Penetapan Harta Kekayaan Semasa Pewaris Masih Hidup .....	60
A.2.2. Sifat Hukum Waris Adat.....	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	63
A.1. Sifat Penelitian .....	64
A.2. Cara Pendekatan.....	64
A.3. Lokasi Penelitian .....	65
A.4. Jenis Penelitian.....	65
A.5. Metode Pengumpulan Data.....	69
A.6. Teknik Pengumpulan Data .....	69
A.7. Jalannya Penelitian.....	71
A.8. Langkah Penelitian.....	72
A.9. Teknik Analisa Data.....	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	75
A. Pendahuluan .....	75
A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76
Tinjauan Umum Responden.....	77
A.1.1. Kedaan Responden .....	78

B.1. Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa di Kabupaten	
Daerah Tingkat II Karanganyar .....	82
B.1.1. Pelaksanaan Pewarisan.....	82
B.1.2. Penyelesaian Sengketa Pewarisan pada	
Masyarakat Adat Jawa di Kabupaten	
Karanganyar .....	103
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN .....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

1. Jenis Responden.....	78
2. Umur Responden.....	79
3. Pekerjaan Responden.....	81
4. Proses Pewarisan.....	85
5. Peralihan Harta Warisan .....	87
6. Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia .....	89
7. Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia .....	92
8. Asal Harta Warisan .....	94
9. Bentuk Harta Warisan.....	95
10. Macam Ahli Waris .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memang melaksanakan aturan-aturan tingkah laku baik yang berupa aturan hukum maupun yang bukan aturan hukum. Namun dalam kenyataan ini, belum nampak mana yang adat dan mana yang Hukum Adat. Sehingga adat dan Hukum Adat berjalan seiring dan tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat yang mempunyai akibat hukum dan adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

Hukum Adat hanya merupakan sebagian dari adat istiadat suatu masyarakat, sehingga untuk menelaah Hukum Adat harus mampu membedakan antara adat dan Hukum Adat. Untuk itu diperlukan suatu batasan atau atribut untuk membedakan antara adat dan Hukum Adat. Pada dasarnya usaha untuk membedakan antara adat dan Hukum Adat membutuhkan suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman. Kriteria yang digunakan adalah berupa batasan dan atribut yang diberikan kepada gejala hukum (adat) itu. Batasan atau atribut dapat berupa sanksi atau akibat hukum, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, Soepomo dan Soekanto mengenai definisi Hukum Adat.

Van Vollenhoven memberikan suatu batasan untuk membedakan antara adat dan Hukum Adat adalah :

Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang Pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi

(karenanya bersifat “hukum”) dan pada pihak lain berada dalam keadaan yang tidak dikodifikasikan<sup>1)</sup>

Soepomo mengemukakan bahwa:

Peraturan legislatif (*unstatory law*), meliputi peraturan-peraturan yang hidup, meskipun tidak diktakkan oleh yang berwajib, dihormati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>2)</sup>

Demikian pula Soekanto mengemukakan bahwa : Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, jadi mempunyai akibat hukum<sup>3)</sup>

Kriteria yang lain, untuk membedakan antara adat dan Hukum Adat adalah berupa keputusan para fungsionaris hukum merupakan existential moment bahwa adat mejadi Hukum adat. Sehubungan hal tersebut Ter Haar mengemukakan bahwa :

Untuk melihat apakah sesuatu adat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah menjadi hukum adat<sup>4)</sup>.

Perbedaan adat dengan Hukum Adat adalah ada tidaknya unsur paksaan atau sanksi.

Hukum Adat merupakan hukum asli Indonesia adalah suatu kebanggaan bangsa Indonesia karena dapat melihat bentuk dan wajah dari kepribadian Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Moch Nasroen dengan tegas menyatakan bahwa:

Kesanggupan bangsa Indonesia soal kebudayaan ternyata dari Hukum Adat ini adalah tinggi mutunya dalam mengaturketatanegaraan, budi pekerti dan

<sup>1)</sup> Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Djambatan, Jakarta : 1981

<sup>2)</sup> Soerojo Wignojodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat*, cetakan pertama Gunung Agung, Jakarta, 1982.

<sup>3)</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, cetakan pertama, Rajawali, Jakarta, 1981

<sup>4)</sup> Ter Hear, *Asas-asas dan Susunan Hukum Pusponoto*, cetakan ketujuh, Pradiya Paramita, Jakarta



pergaulan hidup manusia. Hukum Adat ini adalah asli kepunyaan dan ciptaan bangsa Indonesia sendiri <sup>5)</sup>

Namun harus tetap disadari bahwa Hukum Adat yang dibanggakan tersebut bereksistensi dalam suatu suasana perubahan sosial (*social change*) yang sangat cepat. Perubahan Sosial itu mulai dirasakan bersama semenjak tahun 1945. Sekalipun perubahan sosial tersebut tidak langsung dengan seketika. Namun sejak saat itu baik disadari atau tidak, proses perkembangan masyarakat berubah dengan cepat sekali. Proses yang sifatnya spontan yang dibiarkan dan digantungkan kepada perkembangan spontan faktor-faktor sosial budaya dalam masyarakat, menjadi suatu proses yang secara sengaja ingin diubah, dipengaruhi serta diarahkan kepada keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan.

Hukum Adat sebagai suatu sistem hukum Indonesia mempunyai corak yang khas berbeda dengan sistem hukum yang dianut di negara Barat. Sekalipun Hukum Adat bersifat tradisional, yang berarti terikat pada tradisi-tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang, namun tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa Hukum Adat itu pantang berubah. Kelihatannya memang agak ironi antara tradisi dan perubahan merupakan dua kutub yang saling bertolak belakang. Tradisi menghendaki kelangsungan secara apa adanya tanpa perubahan sedikitpun (bersifat statis). Sedangkan perubahan tidak menghendaki secara turun-temurun, tetapi dalam setiap waktu segala-galanya perlu berubah dan diperbaharui.

---

<sup>5)</sup> Moch. Nasroen, *Falsafah Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta. 1967.

Hukum Adat selain bersifat tradisional juga bersifat dapat berubah dan mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa hukum yang timbul dalam perkembangan zaman. Oleh karenanya Hukum Adat mempunyai sifat yang dinamis dan plastis. Dinamis artinya Hukum Adat mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang pasti membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalannya sejarah. Plastis artinya dalam pelaksanaannya diperhatikan hal-hal yang tersendiri.

Dengan demikian Hukum Adat yang timbul dan berakar dari kenyataan hidup dalam masyarakat, proses pengkaidahnya tidak tergantung kepada penguasa dan masyarakat. Hukum Adat sebagai hukum yang hidup berlakunya tidak tergantung kekuasaan penguasa; akan tetapi tergantung pada kekuatan dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila penguasa memutuskan untuk mempertahankan Hukum Adat sebagai hukum yang hidup, tetapi hukum itu sudah mati, maka putusan itu akan sia-sia belaka. Demikian pula sebaliknya apabila penguasa memutuskan Hukum Adat itu harus diganti, padahal hukum itu masih hidup dan kokoh, maka usaha itu juga akan sia-sia belaka.

Dalam hal ini Van Vollenhoven mengemukakan bahwa:

Jikalau dari atas atau penguasa diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat, padahal hukum itu sudah mati, maka penetapannya itu sia-sia belaka sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa diladang-ladang, dan di pasar-pasar hukum itu, masih kokoh serta kuat maka hakimpun akan sia-sia belaka.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup telah dibahas di dalam seminar Hukum Nasional III dan IV oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 1974

dan 1975 yang diselenggarakan di Surabaya dan di Yogyakarta, menyimpulkan bahwa: Dalam Rangka pembinaan Hukum Nasional harus memperhatikan Hukum Adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (The living law). Konsep "The living law" dikemukakan oleh Eugen Eurlich tahun 1973 sebagai reaksi terhadap pandangan legalistik yang mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum yang ada di dalam masyarakat; istilah tersebut biasanya digunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat Hukum Adat diperkirakan dan diakui sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa Indonesia dan diakuinya eksistensi Hukum Adat oleh Pemerintah Hindia Belanda yang hidup berdampingan dengan Hukum Barat.

Hal ini berarti Hukum Adat mempunyai fungsi dan peranan dalam memelihara dan mempersatukan bangsa. Oleh karenanya Hukum Adat tidak lagi ditafsirkan sebagai hukum penduduk asli, tetapi sebagai hukum tidak tertulis dari bangsa Indonesia yang harus digali dan dimanfaatkan bagi pembinaan hukum nasional.<sup>6)</sup>

Hukum Adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Hukum Nasional sebab Hukum Adat berintikan kepribadian atau jiwa bangsa dan menjelma menjadi Hukum Nasional. Hukum Adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan sebagai salah satu ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar hukum baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

---

<sup>6)</sup> Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

Salah satu dari bidang Hukum Adat untuk pembinaan Hukum Waris Nasional adalah Hukum Waris Adat. Oleh karena itu bahan-bahan Hukum Waris Adat perlu diketemukan baik dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan, untuk mencari titik temu dari berbagai sistem hukum dan asas Hukum Waris Adat yang terdapat di seluruh Nusantara.

Hukum Adat mampu menerima (meresepiir) pengertian-pengertian dan lembaga-lembaga yang berasal dari hukum asing termasuk Hukum Islam, yang berlaku sebagai hukum sendiri serta menjelma menjadi hukum baru. Dan Soerojo Wignjodipoero menamakan Hukum Adat Baru. Hukum yang baru itu telah berlaku di seluruh Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan misalnya bidang perbankan, asuransi dan sebagainya, dan hal tersebut belum dikenal sebelumnya. Peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari perasaan keadilan dan hukum rakyat serta selanjutnya wajar kalau dipandang sebagai Hukum Adat Modern Indonesia. Perkembangan Hukum Adat tidak hanya terjadi setelah Indonesia merdeka tetapi sejak jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan, Perkembangan Hukum Adat dipengaruhi beberapa faktor yaitu proses kebangkitan individu, pengaruh kekuasaan asing, dan agama

## **B PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat adat Jawa di Kabupaten Karanganyar melakukan pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia ?
2. Siapa yang berperan menyelesaikan permasalahan apabila timbul sengketa ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengapa masyarakat adat di kabupaten Karanganyar melakukan pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan memahami siapa yang berperan menyelesaikan permasalahan apabila timbul sengketa.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya waris adat.

### E. SISTEMATIKA TESIS

Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Jawa Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Di Kabupaten Karanganyar”** ini disusun oleh penulis setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagaimana akan diuraikan dalam Bab III.

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling terkait satu sama lain, dan terinci dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V.

Bab I adalah pendahuluan yang didahului dengan latar belakang masalah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis ini. Agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka dibuat ruang lingkup permasalahan yang dirumuskan dalam 2 (dua) pertanyaan. Selain itu, dalam

Bab I ini diuraikan pula apa yang menjadi tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.

Bab II adalah merupakan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini didahului dengan uraian tentang Pewarisan, baik pengertian maupun obyek, subyek dan sistem pewarisan adat.

Bab III berisi tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, langkah-langkah penelitian serta diakhiri dengan analisis data.

Pada Bab IV akan diuraikan pembahasan hasil penelitian terhadap Pewarisan menurut hukum adat pada masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar.

Bab V ini merupakan bab penutup dari seluruh uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A PENGERTIAN HUKUM WARIS ADAT**

Adat adalah merupakan suatu pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, tiap-tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri satu dengan yang lain tidak sama. Dengan adanya ketidaksamaan ini dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hukum waris adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikan dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga pada hakikatnya Hukum Adat adalah penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, pada waktu pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi). Hal inilah yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris menurut Bur-gerlijk Wetboek (BW)<sup>7)</sup>

---

<sup>7)</sup> Sugangga, **Hukum Waris Adat**, CV. Sumber Karya, Universitas Diponegoro, 1995.

Untuk lebih memahami pengertian Hukum Waris Adat, sengaja dikutip beberapa pendapat para sarjana, antara lain:

Soepomo, mengemukakan bahwa:

Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya<sup>8)</sup>

Ter Haar merumuskan pengertian Hukum Waris Adat:

Hukum Waris Adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Demikian pula, Soeripto mengemukakan bahwa:

Hukum Waris Adat adalah mengatur penerusan harta kekayaan materiel atau immateriel dari suatu generasi (angkatan) kepada ahli waris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Hukum Waris Adat itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses penerusan dan peralihan itu dapat dimulai sejak pewaris masih hidup dan atau setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Hukum Adat pewarisan dapat terjadi sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan pewarisan menurut Hukum Islam hanya dapat berlangsung setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini berkaitan dalam membicarakan warisan masalah pokok yang pertama adalah adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya orang-orang yang menerima waris<sup>9)</sup>

---

<sup>8)</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramta, Jakarta, 2000.

<sup>9)</sup> Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua, Indonesia Hill Co, Jakarta, 1987.



Pewarisan dapat dimulai sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah, *toescheiding* (Ter Haar) dan akan diperhitungkan kelak dikemudian hari, apabila dilakukan pembagian warisan setelah orang tua meninggal dunia. Sedangkan pewarisan yang terjadi setelah orang tua meninggal dunia disebut warisan, *Verefen* (Ter Haar). Oleh karena itu, pengertian pewarisan belum tentu merupakan pembagian harta warisan, akan tetapi mungkin pembagiannya harus ditunda, ataukah mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan untuk dibagi. Pewarisan adalah sebuah proses berlangsungnya penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari generasi ke generasi.<sup>10)</sup>

Hukum Waris, di samping mengatur proses pewarisan, juga mengatur ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik yang bersifat materiel maupun yang immaterial. Harta warisan menurut Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris. Harta warisan yang tidak dibagi-bagi merupakan milik bersama para ahli waris dan tidak boleh dimiliki secara perorangan, kecuali dengan izin atau musyawarah keluarga. Harta warisan yang tidak dibagi-bagi merupakan konsep Hukum Adat di dalam lingkungan hukum yang berhubungan dengan asas bahwa: Harta benda yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain dari pada bersama-sama dengan para ahli waris lainnya secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tidak terbagi-bagi.<sup>11)</sup> Keadaan ini berkaitan dengan keberadaan jenis benda dalam harta warisan yang dibedakan

<sup>10)</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Cetakan Pertama, Liberty Jakarta, 1978.

<sup>11)</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cetakan Ketiga, Trita Mas Indonesia: Jakarta, 1982.

berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Sedangkan harta warisan yang dapat dibagi-bagi merupakan modal dasar kehidupan somahnya. Hal ini berbeda dengan Hukum Waris Islam, bahwa harta warisan merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai harganya dengan uang dan dapat dipecah-pecah secara matematik.

Anak si pewaris yang merupakan golongan waris utama dan pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris sebab golongan ahli waris lain tidak akan tampil sebagai ahli waris, apabila si pewaris mempunyai anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka anggota keluarga lain akan tertutup menjadi ahli waris. Dengan demikian pengertian ahli waris adalah para warga yang paling karib di dalam generasi berikutnya yaitu anak-anak kandung. Sedangkan hak mewaris dari tiap-tiap anak kandung (laki-laki dan perempuan) tidak selalu sama, bahkan ada yang mempunyai hak mewaris dan tidak mempunyai hak mewaris dipihak lain; Untuk menentukan berhak atau tidaknya hak mewaris dipengaruhi oleh system masyarakat yang dianut. Pada masyarakat yang menganut system bilateral (parental) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan pada masyarakat unilateral hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris (patrilineal) atau anak perempuan saja yang berhak mewaris (matrilineal).

Oleh karenanya dalam hal pewarisan bukan hanya sekedar peralihan dan pengoperan harta benda tetapi juga merupakan peralihan dan pengoperan hak serta kewajiban yang diperlakukan secara berkesinambungan. Sehingga para ahli waris tidak hanya menerima dan mengambil alih hak-hak pewaris melainkan juga untuk meneruskan dan mengambil alih kewajiban-kewajiban pewaris, misalnya hutang-hutang pewaris dan sebagainya.

Perbedaan yang terdapat antara hukum waris adat dengan hukum Barat yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) adalah, bahwa hukum waris adat tidak mengenal “bagian mutlak” (*legitieme portie*) seperti yang terdapat dalam hukum Barat, karena dalam Hukum Waris Adat, pengertian penerusan dan pengoperan hukum harta kekayaan pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris. Oleh karena itu diusahakan agar barang yang dioperkan kepada ahli waris itu harus tepat, pantas dan ahli waris senang pada barang itu. Sejak masih anak-anak ahli waris sudah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari orang tuanya (pewaris), baik tentang kesenangannya maupun bakat masing-masing, sehingga pada waktu dia (pewaris) tua, dan sudah saatnya mengoperkan atau meneruskan harta kekayaannya, maka pewaris akan mendapat ahli-ahli waris yang tepat dan pantas untuk menerima hartanya. Cara pengoperan harta kepada para ahli waris dalam hukum waris adat, senantiasa dilaksanakan dengan dasar kerukunan dengan memperhatikan keadaan istimewa (bakat, pantas, patut) seperti tersebut di atas. Itulah sebabnya pula harta benda (harta warisan) dalam Hukum Waris Adat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi senantiasa disesuaikan dengan kepantasan dan kepatutan tersebut untuk ahli waris.

#### **A.1 UNSUR-UNSUR HUKUM WARIS ADAT**

Seperti halnya dengan Hukum Adat, maka hukum waris adatpun mempunyai dua unsur, yaitu :

- a. **Unsur asli**, yaitu berupa kebiasaan. Unsur ini merupakan bagian yang terbesar dari Hukum Waris Adat. Ini dapat dipahami karena hukum adat dalam hal ini hukum waris adat telah ada jauh sebelum agama-agama yang ada di Indonesia sekarang ini masuk ke Indonesia.

- b. **Unsur Agama**, unsur ini merupakan unsur kecil, karena hanya bagian-bagian tertentu saja dari hukum agama yang diresepi ke dalam hukum adat waris. Contoh apa yang dijumpai di Bali, Hukum Waris Adat Bali meresepi bagian-bagian tertentu dari hukum Agama Hindu yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Bali. Ter Haar sebenarnya tidak sependapat dengan hukum waris adat adalah hukum agama, tetapi dalam kenyataannya sesudah agama-agama masuk ke Indonesia, banyak pula unsur-unsur dari hukum agama seperti Hindu, Budha, Islam dan lain-lain, masuk ke dalam hukum waris adat. Apalagi kalau agama itu sudah menjadi dasar pandangan hidup masyarakat/manusia, maka sudah tentu sering agama menjelma menjadi hukum, setidaknya mempengaruhi hukum.

Menurut Prof. Surojo Wignjodipuro, SH, "Hukum Adat Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya".

Selanjutnya beliau mengatakan: "Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak), yakni :

- a). seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan;

- b). seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
- c). harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concerto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.

Penjelasan dari tiga unsur tersebut dijelaskan :

- unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada;
- unsur kedua menimbulkan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dengan ahli waris;
- unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Juga ditegaskan oleh beliau, bahwa kita wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia. Proses pertama itu (selama masih hidup) lazimnya disebut "penghibahan" ( Prof. Soepomo memakai istilah " pewarisan "; Ter Haar memakai istilah "toeschiding") umumnya disebut " warisan " ( Prof. Soepomo "hibah wasiat", wekasan atau welingan (Jawa), Ter Haar "vereven"; Wirjono Prodjodikiro "warisan").

- d. Prof. Ter Haar, dalam buku beliau yang berjudul “ Beginnelsen en stelsel van het Adatrecht “diterjemahkan menjadi” Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat ”, memberikan rumusan mengenai pengertian waris adat, sebabagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan harta warisan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum adat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum waris adat adalah, “keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia”.

#### **A.1.1 PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT.**

##### **1. Sistem Kewarisan Adat**

Pada masyarakat adat di Indonesia mengenal berbagai macam bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah dikenal sebelum masuknya agama Islam, Kristen maupun Hindhu. Sistem keturunan yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh pula pada sistem kewarisan dalam Hukum Adat.

Sistem keturunan (kekerabatan) pada masyarakat adat Indonesia ada tiga corak yaitu:

- a. Sistem Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruh daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Sistem ini banyak terdapat di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.
- b. Sistem Matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria dalam pewarisan. Sistem ini dianut pada masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor.
- c. Sistem Bilateral (parental) yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ke dua belah pihak (bapak dan ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem ini banyak dianut pada masyarakat Jawa, Riau, Kalimantan, dan Sulawesi.

Di samping itu masih ada sistem garis keturunan yang lain antara sistem garis keturunan patrilineal dan sistem garis keturunan matrilineal terdapat suatu bentuk sistem campuran atau sistem beralih-alih yang disebut "sistem alterend", misalnya di daerah Rejang.

Dalam perkembangannya sekarang ini, pengaruh kekuasaan orang tua sangat besar (bilateral), sehingga mengakibatkan semakin melemahnya pengaruh kekuasaan kerabat pada sistem kekeluargaan unilateral (patrilineal dan matrilineal) khususnya berkaitan dengan kebendaan dan pewarisan. Hal ini bukan berarti bahwa sistem kekeluargaan unilateral

habis atau hilang, melainkan masih dapat diketemukan di beberapa daerah di kalangan masyarakat tertentu di pedesaan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Hazairin masih nampak kebenarannya bahwa "Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, dan parental."<sup>12)</sup>

Hukum Waris Adat secara umum dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada suatu masyarakat. Prinsip-prinsip garis keturunan ini sangat berpengaruh dalam penetapan ahli waris ataupun bagian harta warisan yang ditinggalkan.

"Sifat kewarisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada harta kekayaan dalam masyarakat itu."<sup>13)</sup>

Sistem kewarisan yang dikenal pada masyarakat Indonesia adalah :

- a. Sistem Kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan di mana setiap ahli waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing.

Sistem kewarisan ini pada umumnya berlaku pada kalangan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, misalnya terdapat pada masyarakat di Jawa, Batak dan Lampung. Kebaikan sistem kewarisan individual ini antara lain, dengan pemilikan secara

---

<sup>12)</sup> Soebekti R, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni: Bandung, 1974.

<sup>13)</sup> Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni: Bandung, 1981.



individu maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki bagian harta warisannya, untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan, tanpa dipengaruhi oleh anggota -anggota keluarga yang lain. Sedangkan kelemahan sistem kewarisan ini adalah dapat mengakibatkan pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan. Sehingga dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki secara pribadi, serta mengutamakan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu sistem kewarisan individual dapat menjurus ke arah sifat individualisme dan materialisme.

- b. Sistem Kewarisan Kolektif adalah sistem kewarisan di mana harta warisan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta warisan itu. Cara pengelolaan harta warisan itu untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat. Sistem kewarisan ini terdapat pada masyarakat Minang kabau dan Minahasa.

Sistem kewarisan kolektif ini mempunyai fungsi yang besar karena urgensi harta warisan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar pada masa sekarang maupun masa mendatang, dalam hal tolong menolong antara sesama anggota di bawah pimpinan kepala kerabat.

Kelemahan sistem kewarisan kolektif ini adalah menimbulkan cara berfikir terlalu sempit bagi orang luar.

Pesan atau wasiat dari orang tua kepada ahli waris biasanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan pamong desa. Perbuatan pesan ini harus “terang” agar mendapat perlindungan dalam lalu lintas hukum di luar lingkungan kerabat. Menurut Hukum Adat yang dapat menerima pesan adalah ahli waris. Soepomo mengemukakan bahwa “Pewarisan atau hibah wasiat hanya merupakan perpindahan (*vershuiving*) harta benda di dalam lingkungan ahli waris.” Prinsip tersebut berkaitan dengan tujuan hibah yaitu:

1. Memberikan pernyataan mengikat terhadap sifat-sifat dari barang-barang yang akan menjadi harta peninggalan seperti harta asal, warisan, harta yang diperoleh sendiri dan sebagian.
2. Mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta peninggalan secara layak menurut anggapan pewaris dan untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam membagi harta peninggalan dikemudian hari.

Penuangan wasiat ke dalam bentuk testament mulai menjadi kebiasaan di kalangan rakyat yang berstatus sosial baik. Testament sebagai lembaga baru maka pengintergrasiannya ke dalam Hukum Adat. Biasanya ditangguhkan pembagiannya, biasanya dikuasai oleh janda, anak (tertua), anggota keluarga lainnya dan tua-tua adat. Bagi yang

menguasai harta warisan itu, bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan harta tersebut, baik berupa hutang maupun piutang serta pengurusan para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris untuk kelangsungan hidupnya.

Pada masyarakat bilateral, janda dapat menguasai harta warisan suami selama hidupnya atau mengalihkan kepada anak-anaknya setelah dewasa atau berumah tangga. Bahkan kadang-kadang janda berperan sebagai pembagi harta warisan kepada anak-anaknya tanpa ada campur tangan orang lain. Sedangkan apabila janda tidak mempunyai anak, janda dapat menguasai harta warisan sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia (Keputusan M.A. No. 298/K/Sip/1958, tanggal 29 Oktober 1958).

Pada masyarakat patrilineal, yang menganut sistem perkawinan jujur maka isteri masuk anggota kekerabatan suami dan janda tetap dapat menguasai serta menikmati warisan selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya. Namun apabila janda tidak mempunyai keturunan, ia dapat kawin lagi dengan saudara laki-laki suami atau dengan orang lain yang ditunjuk oleh kerabat sebagai pengganti suami untuk mendapatkan luar, misalnya pemuka masyarakat, pemuka agama, atau kepala desa. Campur tangan orang luar baru diperlukan, apabila dalam pembagian harta warisan itu tidak terjadi kesepakatan. Dengan kata lain selama proses pembagian harta itu berjalan secara rukun dan damai (lancar) maka campur tangan orang luar

tidak diperlukan atau apabila ada, hanya bertindak sebagai saksi (biasanya kepala desa).

Hukum Adat juga tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan secara matematis, tetapi pembagian yang berdasarkan atas pertimbangan karena mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun Hukum Adat mengenal asas persamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, nilai harga sama, atau menurut bagian yang sudah ditentukan. Di kalangan masyarakat tertentu pada masyarakat Jawa dijumpai beberapa kemungkinan cara pembagian harta warisan yaitu:

1. Segendong sepikul artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
2. Dum-dum kupat artinya bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama.

Demikian cara pembagian harta peninggalan dilakukan berdasarkan asas kesamaan dan kesebandingan.

#### **A.1.2 AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT**

Ahli waris utama dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Dimasyarakat bilateral (Jawa), anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.

Anak kandung (laki-laki atau perempuan) adalah merupakan generasi penerus dari orang tuanya. Oleh karena itu harta warisan dalam bentuk apapun akan diteruskan pada anak kandung yang pada gilirannya sebagai barang asal. Hal ini sesuai dengan falsafah perkawinan bangsa Indonesia yaitu salah satu tujuan pokok perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan (anak), agar dapat menjadi penerus hidupnya. Berkaitan dengan ini Ter Haar mengemukakan bahwa: anak-anak adalah tempat di mana pelbagai macam harta benda keluarga kepunyaan orang tuanya berkumpul jadi satu sebagai satu macam harta benda yang disebut barang asal dan begitu seterusnya.

Dengan mendasarkan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan maka seyogyanya bagian warisan masing-masing adalah sama besar (satu dibanding satu). Sehingga Mahkamah Agung melalui keputusan No.179/K/Sip/1961 menetapkan: bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Kedudukan janda pada masyarakat bilateral menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dalam Hukum Waris Adat. Janda pada dasarnya adalah bukan ahli waris, walaupun demikian janda mempunyai sejumlah hak yang memberikan kedudukan kuat menurut Hukum Waris Adat yaitu berhak mendapatkan bagian harta warisan suami bersama-sama dengan ahli waris lainnya serta berhak menahan pembagian harta warisan. Disamping itu, apabila dalam perkawinan tidak mendapat keturunan maka janda berhak menguasai dan menikmati harta asal suami sampai kawin lagi atau meninggal dunia.

Kedudukan janda bukan sebagai ahli waris harta warisan suami, merupakan suatu gambaran bahwa janda adalah orang asing. Walaupun demikian sebagai isteri berhak mendapat manfaat dari harta warisan, apabila harta gonogini tidak mencukupi untuk dapat hidup yang layak sepanjang ia tidak kawin lagi atau meninggal dunia.

Mengenai kedudukan janda, banyak para sarjana mengemukakan bahwa janda bukan ahli waris akan tetapi berhak menikmati harta warisan suaminya baik harta gono-gini maupun harta asal suami. Demikian pula adanya perkembangan kedudukan janda dalam keputusan-keputusan hakim, sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menetapkan bahwa janda adalah bukan ahli waris (Keputusan Raad van Justitie Bataviaa tanggal 26 Mei 1939, T.153 – 148 tanggal 17 Nopember 1939 dan T. 151 – 193 tanggal 26 Nopember 1939) dan hanya keputusan Landraad Purworejo (T. 143-299) tanggal 25 Agustus 1937 yang menyatakan bahwa janda berhak atas barang pencaharian dan gono-gini, sedangkan barang asal kembali kepada saudara pewaris.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat Keputusan Mahkamah Agung No.387 K/Sip/1958 yang isinya: bahwa janda berhak mendapat separo harga gono-gini. Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tersebut berarti telah terjadi perkembangan kedudukan janda, yang semula janda hanya berhak menikmati, kemudian menjadi memiliki harta warisan suaminya. Kedudukan janda sebagai ahli waris baru secara tegas diakui legalitasnya pada tahun 1960, yaitu setelah dikeluarkannya

keputusan Mahkamah Agung No.110 K/Sip/1960, tanggal 20 April 1960 yang menetapkan bahwa: menurut Hukum Adat seorang janda adalah ahli waris almarhum suaminya. Dengan mendasarkan keputusan tersebut, maka Mahkamah Agung tidak lagi membatasi kriteria ahli waris yang didasarkan persamaan darah atau keturunan melainkan juga didasarkan hubungan perkawinan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam suatu perkawinan hubungan lahir dan batin antara suami dengan isteri dapat dikatakan sedemikian eratnya; sehingga melebihi hubungan suami dengan para anggota keluarga sedarah. Di samping itu janda ikut merasakan suka dan dukanya kehidupan bersama-sama dengan suami. Berdasarkan kenyataan itu maka dapat dirasakan memenuhi rasa keadilan, apabila janda diberi hak waris harta warisan suami bersama-sama dengan anaknya.

Subyek hukum yang berhak mendapatkan warisan adalah:

1. Anak-anak kandung, anggota kerabat atau keluarga sedarah.
2. Anak angkat (kalau ada)
3. Isteri ....<sup>14)</sup>

### **A.1.3 PRINSIP DASAR PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

#### **a. Subyek Hukum Waris Adat.**

Pada umumnya yang termasuk ahli waris dalam hukum waris adat adalah:

---

<sup>14)</sup> Muderin Zain, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

## **1. Anak Kandung**

1.1. Anak sah, anak yang dilahirkan dengan sah, artinya anak yang lahir dari perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita atau lebih, berdasarkan peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pengertian anak kandung tidak lain anak yang dikandung oleh Ibu akibat dari hasil perkawinan yang sah dari Ibu dan Bapakny. Sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974), perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum Agama atau kepercayaan. Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan tidak berdasarkan hukum agama, maka anak itu tidak sah, maka dengan sendirinya anak tersebut tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak mewaris.

1.2. Anak tidak sah, kebalikan dari anak sah, adalah anak tidak sah, artinya anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah, Biasanya anak tidak sah ini disebabkan karena adanya hubungan gelap atau kumpul.

## **2. Anak Tiri**

Anak Tiri adalah anak yang dibawa Ibunya atau Bapakny dalam perkawinan. Oleh karena itu anak tiri tidak ahli waris dari bapak tirinya, demikian pula anak tiri buka ahli waris dari Ibu tirinya.

Anak tiri yang hidup bersama di satu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri adalah anggota rumah tangga pula.



Dalam hal demikian ada kerjasama dan untung bersama, yaitu hidup bersama didalam satu rumah tangga yang membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terhadap anggota yang lain.

Terhadap ibunya atau bapaknya sendiri, anak itu adalah waris, terhadap ibu tiri atau bapak tirinya anak itu bukan waris, akan tetapi teman serumah tangga.

Landraad Purworejo dahulu memutuskan pada tanggal 14 Agustus 1937 (T. 148, halaman 286), bahwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tiri, ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri, yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.

Pun didalam putusan Kamar ke-III dari Raad Yustisi tanggal 17 Maret 1939 (T. 151, halaman 168) dikatakan, bahwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya.

### **3. Anak Angkat.**

Kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris Adat, mempunyai kedudukan yang khusus karena anak angkat adalah orang luar yang mendapat perlakuan istimewa dan mendapat pula bagian warisan.

Perlakuan istimewa ini karena begitu besar perannya dalam rumah tangga tersebut.

Pengangkatan anak di beberapa daerah daerah lingkungan Hukum Adat Indonesia ternyata tidak sama. Sehingga berakibat pula pada perbedaan kedudukan anak angkat itu.

Anak Angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak angkat tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (gezinlid), akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (neefesof nichtjes-adoptie), lelaki atau perempuan berdasar alasan :

- a. untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- c. berhubung dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri;
- d. mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Bagaimanapun juga dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat gawe, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga

(*gezinverhouding*) antara bapak dan ibu angkat di satu pihak dan anak angkat di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut. Konsekuensi itu digambarkan dengan tepat oleh yurisprudensi sebelum Perang Dunia II.

Putusan Landraad Purworejo, tanggal 28 Agustus 1937 (T. 148 halaman 299) menetapkan, bahwa barang pencarian dan barang gono gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedang barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak (kandung).

Kamar ke-III dari Raad Yustisi Jakarta, memutuskan pada tanggal 24 Mei 1940 (T. 153, halaman 140), bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang gono gini orang tuanya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau tidak ada turunan seterusnya.

Anak angkat berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan seperti halnya dengan janda. Kedudukan anak angkat di dalam harta peninggalan memang dapat disamakan dengan kedudukan janda.

Pengangkatan anak di beberapa daerah lingkungan Hukum Adat Indonesia ternyata tidak sama. Sehingga berakibat pula pada perbedaan kedudukan anak angkat itu.

Pengangkatan anak di masyarakat bilateral, pada umumnya adalah bukan ahli waris sebab anak angkat tidak mempunyai hubungan darah orang tua angkatnya. Namun diperlakukan sebagai anaknya, sehingga kelak dikemudian hari diharapkan dapat memelihara dan meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak di Jawa misalnya, tidak memutuskan hubungan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Proses pengangkatan anak pada masyarakat bilateral Jawa berbeda dengan masyarakat unilateral, yaitu hanya sekedar selamatan untuk penyaksian pengangkatan anak dan dihadiri oleh keluarga dekat dan pemuka masyarakat atau kepala desa. Sehingga pengangkatan anak di Jawa lebih bersifat sosial dan Psikologis dari pada bersifat yuridis.<sup>15)</sup>

Mengenai kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya, pada umumnya para sarjana memandang bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris dalam arti seperti anak kandung. Hal ini dikemukakan antara lain oleh Bertling, Ter Haar, Soepomo, Djodjodigono, Imam Sudiyat, dan Soeripto mengemukakan bahwa, anak angkat adalah bukan ahli waris yang berstatus seperti anak kandung tetapi hanya berhak mendapat bagian harta bersama orang tua angkat, sedangkan harta asal tetap kembali ke asal dan berhak

---

<sup>15)</sup> Darjen Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua, Transisa, Bandung, 1984.

pula harta warisan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, Djodjodigono dan Tirtawinata mengemukakan bahwa :

Anak angkat diibaratkan minum "sumur loro" (dua sumber) artinya anak angkat berhak menerima bagian harta bersama orang tua angkat tetapi juga masih mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena kedudukan dengan orang tua kandungnya tidak terputus.<sup>16)</sup>

Demikian pula apabila pengangkatan ditinjau dari yurisprudensi, nampaknya tidak ada perubahan tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. Yurisprudensi sebelum Kemerdekaan dimulai dengan putusan Landraad Purworejo (T.148-299), tanggal 25 Agustus 1937 sampai dengan antara lain, Keputusan No. 249 K/Sip/1972 tanggal 31 Mei 1972 (Jawa Barat), Keputusan No. 441/Sip/1972 tanggal 2 Januari 1972 (Jawa Tengah) dan Keputusan No. 514 K/Sip/1972 (Jawa Timur) yang isinya : bahwa anak angkat bukan ahli waris seperti anak kandung tetapi berhak menerima bagian harta bersama orang tua angkatnya.

Mengenai jenis kelamin anak angkat, pada umumnya disesuaikan dengan sistem kekeluargaan yang dianutnya, misalnya anak laki-laki atau perempuan (bilateral), anak laki-laki (patrilineal). Sedangkan umurnya, tidak ada ketentuan yang pasti dan pada umumnya berumur di bawah lima tahun. Namun juga ada pengangkatan orang yang sudah dewasa sebagai anak angkat yaitu di Kecamatan Mertapura dan Kabupaten Banjar (Kalimantan).

---

<sup>16)</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1981

Disamping motifasi pengangkatan anak sebagai penerus keturunan, dikenal pula beberapa motivasi pengangkatan anak antara lain :  
 pengangkatan anak semu, seperti dikemukakan oleh Herlian Sumampouw yaitu :

Adopsi yang dilakukan sehubungan dengan tindakan magis, agar terhindar dari bahaya, misalnya seorang anak sakit terus menerus disebabkan kelahirannya itu sama dengan hari pasaran (pon, wage, dan seterusnya) orang tuanya. Untuk menghindari hal tersebut, anak itu diberikan kepada lain (biasanya saudara dari ibu atau bapaknya)<sup>17)</sup>

Di Purwakarta ada semacam kepercayaan yaitu, apabila seseorang mempunyai lima anak laki-laki, maka salah seorang (bungsu) dijual kepada saudara dekat yang menjadikan anak angkat. Kepercayaan ini dipengaruhi sifat Pendawa lima dalam dunia pewayangan dan apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan, akan mengakibatkan salah seorang dari orang tuanya atau salah seorang anak laki-laki tersebut akan meninggal dunia.

Dalam hukum adat, dikenal adanya dua macam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka-pemuka adat/pejabat adat (ini pengertian terang) dan seketika.

---

<sup>17)</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Maret 1959, Reg. No. 37 K/Sip/1959, sebagai berikut :

“Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya”.

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 23 Juli 1973, Reg. No.102 K/Sip/1972, sebagai berikut :

“Menurut Hukum Adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya demikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya”.

#### 4. Janda

Menurut Hukum Waris Adat seorang janda dapat mewaris atau tidak, juga sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa pada masyarakat adat yang menarik garis kekeluargaan yang bersistem Parental/Bilateral, janda adalah ahli waris terhadap barang pencaharian bersama (gono-gini) sedang untuk harta asal almarhum suaminya janda berhak tetap pada kekuasaannya untuk dinikmati sampai janda itu meninggal dunia atau kawin lagi.

Dengan demikian jelaslah, bahwa janda bukan ahli waris almarhum suaminya. Ia tidak mewaris dari harta asal atau harta bawaan almarhum suaminya, tetapi dia berhak atas sebagian dari harta pencaharian bersama (gono-gini), guna kaya, campur-karya). Janda

tanpa anak, maka janda berhak mengurus, mengatur dan menikmati harta peninggalan suami untuk keperluan hidupnya dan anak-anak sampai anak-anak itu mentas atau mencar.

Didalam rumah tangga suami istri itu, istri itu jikalau suaminya telah meninggal dunia, mempunyai kedudukan istimewa, oleh sebab jikalau misalnya anak-anaknya telah mencar semua, istri sebagai janda tinggal sendiri didalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jikalau ia memerlukannya dan selama ia memerlukannya untuk kehidupannya. Menurut putusan Kamar ke-III Raad van Justitie Batavia tanggal 26 Mei 1939 (T.151: 193) menyatakan bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si suami, jika ternyata bahwa harta gono gini tidak mencukupi. Janda berhak untuk terus hidup sedapat dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan. Janda berhak menguasai harta peninggalan suami. Ia berhak mengurus dan juga membagi-bagi harta peninggalan sesegera anak-anak mereka memerlukannya bagi kehidupannya. Apalagi terhadap harta benda keluarga. Dalam pembagian itu mungkin janda mengambil pelbagai sikap yang merupakan aturan yang umum sebagai berikut :



- a. ia tidak mengambil bagian dari harta peninggalan atau harta benda keluarga, semua dibagi-bagikannya kepada anak, kemudian ia turut salah seorang anak atau berganti-ganti menurut kesenangan kepada siapa ia akan ikut;
- b. ia tidak mengambil bagian tetapi ia menerima hasilnya, tanpa mateng (ng), tampi mateng (kr) (*atau punjingan*);
- c. ia mengambil sebagian dari harta peninggalan atau dari harta benda keluarga untuk kehidupannya. mungkin bagian itu diusahakan sendiri, mungkin pula dipercayakan kepada salah seorang anak. Bagian demikian jika berupa tanah disebut "*kokohan*" atau "*gantungan*";
- d. mengambil bagian seperti ditunjuk oleh yang meninggal.

Dalam keempat sikap tersebut biasanya tidak dibedakan asal harta, mungkin yang diambil janda adalah barang "*gananya sendiri*. Jadi walaupun janda bukan waris dari suami yang wafat, namun menurut hukum adat yang penting adalah janda itu terpelihara hidupnya. Untuk itu ada beberapa kemungkinan, mungkin saja harta peninggalan dibiarkan kepadanya tidak dibagi-bagi atau diadakan pembagian, asal saja kehidupannya terpelihara. Didalam perkembangannya tampak gejala yang menganggap janda/ balu dapat mewaris harta peninggalan yang berasal dari "*gana*" dan bagian *gana gini*". Hal tersebut dikarenakan pertimbangan sebagai berikut :

- pertama, untuk menghindari terjadinya perselisihan anak-anak terutama jika kemudian janda kawin lagi;
- kedua, untuk kepastian hukum, karena banyak terjadi setelah harta tersebut di tangan orang tua menjadi terlantar;
- ketiga, karena pengaruh hukum Islam dimana janda merupakan waris dari suami yang meninggal.

Perkembangan kedudukan janda yang semula hanya sebagai penguasa atas harta peninggalan suami yang wafat, dan bukan merupakan ahli waris antara satu dan lainnya, tetapi kemudian berubah menjadi ahli waris antara yang satu dan yang lain, nampak pada putusan-putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana digambarkan oleh IGN. Sugangga (1978:13) sebagai berikut :

- Putusan MARI tanggal 1 Februari 1959 No. 387 K/ Sip/ 1958 menyatakan bahwa, 'Tidaklah tepat putusan *yudex facti*, bahwa janda harus menerima hanya sepertiga bagian dari harta *gono-gini*, oleh karena kalangan masyarakat di Jawa Tengah sudah makin lama makin meresap perasaan yang dipandang adil berdasarkan sama-sama ikut sertanya para wanita dalam perjuangan nasional, bahwa seorang janda layak mendapat separoh dari harta *gono-gini*, sehingga hal ini menjadi pertumbuhan adat di Jawa Tengah. Putusan ini diperkuat dengan tiga putusan MARI tanggal 25 Februari 1958, 7 Maret 1959 dan 9 April 1960.
- Putusan MARI tanggal 8 Juli 1959 No. 387 K/ Sip/ 1960 yang menyatakan bahwa, 'Selama seorang janda belum kawin lagi

barang-barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi guna menjamin kehidupannya.

- Putusan MARI tanggal 2 September 1960 No. 302 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa berdasarkan alasan tersebut ditambah dengan peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung perihal isi hukum adat tentang warisan sekarang di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa hukum adat di Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Dipertegas lagi dengan putusan-putusan tertanggal 26 Oktober 1960 dan tertanggal 8 November 1960.
- Putusan MARI tanggal 27 Desember 1961 No. 301 K/Sip/1961, yang menyatakan 'Seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, demikian berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya.
- Putusan MARI tanggal 14 Juni 1968 No.100 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa 'Mengingat pertumbuhan masyarakat yang dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan jurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung, maka sudahlah

tepat dan benar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini.

### 5. Hak Waris Mereka Selain Anak

Apabila seseorang meninggalkan anak, maka anak itulah waris yang meninggal.

Harta peninggalan jatuh kepada anak sebagai waris dan janda serta anak angkat, mungkin pula anak tiri, sebagai anggota rumah tangga yang ditinggalkan oleh si mati.

Apabila tidak ada anak, orang tua si mati berhak atas warisan. Demikian putusan Kamar ke-III dari Raad Justisi Jakarta, tanggal 17 Nopember 1939 (di T. 153, halaman 148).

Selain dari apa yang dapat dituntut oleh janda dan anak angkat, maka apabila tidak ada anak, harta warisan pulang kembali setingkat dalam silsilah si mati dan jatuh kepada keturunan dari orang yang terdapat di tingkat itu, demikian tulisan Prof. Ter Haar dalam bukunya: *Beginzellen, enz*, halaman 212. Apabila pada tingkat tersebut tidak ada keturunan (*nakomelingen*), maka harta warisan pulang setingkat ke atas dan demikian seterusnya.

Angkatan yang tertua yang masih hidup (*oudslevende generatie*) menutup (*sluiuit*) angkatan yang lebih muda (*jongere generaties*), dan juga dalam tingkatan-tingkatan tersebut, dasar penggantian waris (*plaatservulling*) berlaku juga.

Apabila keturunan tidak ada, maka orang tua yang berhak. Apabila orang tua telah meninggal, maka saudara lelaki dan perempuan mengganti mereka. Saudara lelaki dan saudara perempuan tidak mempunyai hak waris, selama orang tua (dari si mati) masih hidup. Demikianlah putusan kamar ke-III tersebut, tanggal 20 Januari 1939 9T. 150, halaman 232).

Dalam putusannya, tanggal 30 Juni 1939 (T. 151, halaman 214) Kamar ke-III dari Raad Yustisio di Jakarta menetapkan, bahwa ibu sebagai waris anaknya yang meninggal lebih dahulu, berhak atas seluruh harta peninggalan anak itu dengan menutup (*met uitsluiting*) keluarga dalam silsilah ke samping (*verwanten in de zijline*). Lihat pula putusan hakim tersebut, tanggal 17 November 1939 (T. 153, halaman 148), yang mengatakan bahwa apabila tidak ada anak, maka orang tua si mati berhak atas harta peninggalan anaknya.

Apabila si mati meninggalkan anak, maka orang tua si mati (kakek dan neneknya itu) tidak berhak atas harta peninggalan.

Antara keluarga dalam silsilah ke atas ke bawah (*bloedverwanten in de rechte lijn*) ada kewajiban untuk saling memberi nafkah (*alipmentatieplicht*) jika bantuan nafkah itu dibutuhkannya.

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang

merupakan penerima harta warisan. Mereka itu adalah seseorang atau beberapa orang yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si pewaris yaitu anak yang merupakan ahli waris utama. Dengan adanya anak maka anggota keluarga yang lain tertutup tidak akan menjadi ahli waris apabila si pewaris mempunyai anak, namun karena pengaruh agama atau hubungan kekerabatan, orang yang semula bukan ahli waris utama dimasukkan dalam kelompok ahli waris utama. Sehingga berhak atau tidaknya menjadi ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan mungkin juga dipengaruhi agama. Janda menurut hukum Adat adalah bukan ahli waris, akan tetapi di daerah-daerah Islam yang sistem masyarakatnya bilateral agak berubah, yaitu bahwa janda mendapat bagian tertentu sebagai warisan. pengelompokan ahli waris itu berturut-turut akan tampil sebagai ahli waris utama, apabila ahli waris kelompok utama tidak ada. Pengelompokan ini adalah garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan ini merupakan garis hukum yang menentukan urutan-urutan diantara golongan atau kelompok dalam keluarga pewaris dengan pengertian merupakan garis hukum yang menentukan siapakah di antara orang-orang dalam golongan keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

Dengan menggunakan garis pokok keutamaan itu, maka ahli waris dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu :

1. Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris (anak) atau keturuannya.
2. Kelompok keutamaan II : Orang tua pewaris.
3. Kelompok keutamaan III : Saudara pewaris atau keturunannya.
4. Kelompok IV : Kakek dan nenek pewaris atau keturunannya.

Dalam menentukan ahli waris dengan menggunakan prinsip garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian, maka yang diperhatikan adalah prinsip-prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

#### **b. Obyek Hukum Waris Adat**

Pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga sebagai harta warisan. Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia ( pewaris ). Sedangkan menurut Hukum Adat, pengertian warisan adalah harta yang (akan) diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia wafat, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Harta warisan adalah semua harta kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud (meteril) yang ditinggalkan oleh pewaris, kepada ahli warisnya.<sup>18)</sup>

---

<sup>18)</sup> Ibid, hal. 9

Menurut Hukum Adat harta warisan dapat bersifat ekonomis, magis, dan yuridis. Ekonomis berarti harta warisan sebagai modal dasar kehidupan bagi keturunannya. Magis artinya harta warisan itu mengandung kekuatan gaib (keris pusaka). Sedangkan bersifat yuridis artinya harta warisan itu mempunyai kekuatan hukum (tanah gogolan). Sehingga hal ini berakibat cara pewarisannya juga berbeda yaitu : dapat dibagi-bagi. Sedang terhadap harta warisan yang dibagi-bagi pemiliknya kepada para ahli warisnya tidak berarti bahwa mutlak milik perseorangan tanpa fungsi sosial.

#### c. Wujud Harta Warisan

Harta warisan terdiri dari :

##### 1. Harta Pustaka :

- a. tidak dapat dibagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius.
- b. harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti : sawah, ladang, rumah, dll

##### 2. Harta bawaan : yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan).

Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat :

1. tetap menjadi hak masing-masing dari suami/ istri.



2. setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
3. Harta Perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
4. Hak yang didapat dari masyarakat :

Seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan, dll.

Mengenai harta warisan belum dibagi atau ditangguhkan di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya karena harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda beserta anak-anaknya. Sehingga untuk sementara janda tetap menguasai dan memelihara harta warisan dengan alasan-alasan tertentu. Di samping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan atau pemilikannya karena sifat benda, keadaan dan kegunaanya, misalnya keris pusaka, alat perlengkapan adat dan sebagainya, yang harus diterima oleh ahli waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Menurut S.A. Hakim mengemukakan barang-barang asal terdiri dari harta asal yang terjadi sebelum dan selama perkawinan.

1. Harta asal yang terjadi sebelum perkawinan adalah :
  - a. Barang yang dimiliki istri atau suami sebelum perkawinan
  - b. Barang yang dimiliki istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh karena pewarisan
  - c. Barang yang diperoleh karena pewarisan

- d. Barang yang diperoleh karena pemberian orang lain
- 2. Harta asal yang terjadi selama dalam perkawinan adalah :
  - a. Barang yang diperoleh suami atau istri karena usaha sendiri tanpa tempat usaha sendiri
  - b. Barang yang diperoleh karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewaris, hadiah yang diberikan kepada suami atau istri

Di lain pihak Soeripto mengemukakan bahwa termasuk golongan harta asal adalah :

- a. Pemberian orang tua, barang keturunan warisan dan barang keturunan hadiah (harta pusaka).
- b. Pemberian dari orang tua sebagai hadiah kepada masing-masing selama perkawinan
- c. Warisan sebelum dan selama perkawinan
- d. Pengganti dari pada barang asal
- e. Hasil dari barang asal.

Mengenai hasil harta asal, Ter Haar mengemukakan bahwa hasil dari harta asal kadang-kadang dianggap harta bersama : apabila suami atau istri tidak mempunyai harta asal tersebut ikut bekerja untuk menghasilkan. Namun dalam keadaan tertentu ada beberapa daerah seperti di Jawa Barat terdapat perkawinan “nyalindung kagelung” yaitu isteri lebih kaya dari suami dan di Jawa Tengah perkawinan “magih kaya” yaitu :

- suami lebih kaya dari isteri, maka dalam perkawinan itu tidak akan terjadi harta bersama.
- salah satu suami atau isteri ikut bekerja membantu menghasilkan harta asal tetap masuk harta asal.

**d. Harta Bersama atau Gono-gini.**

Harta bersama adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, sebagai usaha bersama dengan cucuran keringat bersama suami dan atau isteri. Berdasarkan hal tersebut harta bersama adalah harta milik suami dan isteri bersama dan barang milik bersama yang tidak dapat diganggu gugat oleh sisilah ke atas atau ke samping, selama masih ada salah seorang dari suami atau isteri tersebut.

Termasuk golongan harta bersama (gono-gini) adalah :

- a. Barang-barang yang diperoleh bersama suami atau isteri dalam masa perkawinan.
- b. Pemberian-pemberian kepada suami atau isteri bersama selama perkawinan.
- c. Pengganti dari pada barang gono-gini.
- d. Hasil dari barang bersama.

Terlepas apakah ada atau tidaknya bantuan suami atau isteri asalkan selama terjadi dalam perkawinan. Hal ini karena peranan suami atau isteri sangat besar dalam tata kehidupan rumah tangga, lebih-lebih dalam perkawinan terdapat keturunan.

Mengenai kedudukan harta asal Ter Haar, mengemukakan bahwa barang asal ini tetap menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang semula memilikinya. Oleh karena itu harta asal suami atau isteri tidak terlepas penguasaan dan pemilikanya, serta masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Asas umum tersebut tidak berlaku pada masyarakat patrilineal karena harta pihak suami (pada perkawinan jujur) atau pihak isteri (pada perkawinan ambil anak), tidak memungkinkan terbentuknya kebersamaan harta menurut hukum. Kebersamaan harta akan terjadi apabila ada kesederajatan antara suami atau isteri atau disebabkan makin melonggarnya ikatan kerabat.

Dengan adanya harta bersama milik suami dan isteri ini menunjukkan suatu gejala. Hukum Adat, karena dalam proses perkembangan memperlihatkan secara jelas tumbuh dan makin kuatnya kedudukan keluarga (sumah). Hal ini berarti makin berkurangnya pengaruh ikatan kerabat, dan pengaruh ikatan sumah makin lama makin menjadi nyata dan makin lebih penting.

Mengenai hutang selama perkawinan merupakan tanggung jawab bersama yang dibebankan kepada harta bersama. Tetapi apabila tidak cukup dapat dibebankan kepada harta suami atau isteri yang membuat hutang, dengan sendirinya harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Dalam hal ada kebersamaan harta dan tidak mempunyai anak, apabila pewaris meninggal dunia maka harta bersama akan dibagi dua

sama rata. Akan tetapi apabila janda masih memerlukan harta bersama tersebut untuk kehidupannya maka janda berhak untuk menunda pembagian harta tersebut, bahkan apabila dinilai masih kurang mencukupi janda berhak menahan kembalinya harta asal suami sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia. Berkaitan dengan ini telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 298K/Sip/1958 jo. Nomor 89K/Sip/1968 : seorang janda yang ditinggalkan mati suaminya (tanpa anak) berhak menguasai harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan, selama hidupnya atau tidak kawin lagi.

Pembagian harta bersama sebelum janda (hidup terlama) meninggal dunia dan kadang-kadang dipaksakan lebih awal realisasinya, apabila yang bersangkutan kawin lagi atau alasan-alasan lain. Harta bersama sebelum janda (hidup terlama) meninggal dunia dan kadang-kadang dipaksakan lebih awal realisasinya, apabila yang bersangkutan kawin lagi atau alasan-alasan lain.

Dengan demikian baik harta asal maupun sebagian harta bersama suami, janda hanya mempunyai hak menguasai, artinya janda tidak boleh mengasingkan (mengoperkan), tetapi hanya dapat menikmati hasilnya atau mengambil manfaat dari harta bersama dan harta asal tersebut. Harta bersama merupakan hak mutlak suami dan isteri secara bersama-sama, karena diperoleh selama dalam perkawinan. Oleh karena itu keluarga pihak suami atau isteri tidak berhak menuntut pembagian harta bersama, selama salah satu suami atau isteri ini masih hidup. Harta bersama tidak

terletak di dalam lingkaran hak dari keluarga asal masing-masing suami atau isteri.

Namun pembagian tersebut tidak akan terjadi apabila keluarga tersebut mempunyai anak, semua harta warisan, baik harta asal maupun harta bersama menjadi satu kesatuan golongan, yang pada gilirannya akan diteruskan atau diwariskan kepada anak kandungnya. Prinsip tersebut berpangkal pada salah satu tujuan perawinan adalah untuk meneruskan generasi. Sehingga dalam pembagian harta peninggalan apabila mempunyai anak dapat dilakukan beberapa jalan, yaitu :

1. Semua harta warisan dibagi habis (dengan mengingat hibah dan sebagainya) diantara para ahli waris. Sedangkan janda tidak menerima bagian warisan melainkan mengikuti salah satu anak secara bergilir atau menetap kepada salah satu anak yang biasanya terkecil (anak bungsu).
2. Janda mendapatkan pemberian (semacam hibah) dari suaminya sebelum meninggal dunia, misalnya rumah dan pekarangan. Sedangkan harta peninggalan dibagi diantara para ahli waris dan kebutuhan janda dipenuhi oleh para ahli waris atau salah seorang anak kandungnya.
3. Janda mendapatkan harta peninggalan dan sisanya dibagi di antara para ahli waris dan bagian janda biasanya sama dengan bagian tiap-tiap ahli waris.

Mengenai jumlah bagian yang diterima masing-masing ahli waris (laki-laki dan perempuan) adalah sama, akan tetapi kadang-kadang dijumpai pula pembagian tersebut ditentukan berdasarkan keadaan dari masing-masing ahli waris. Di samping itu dijumpai pula bagian anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan, yaitu anak laki-laki mendapat sawah dan anak perempuan mendapat rumah. Hal itu semua semata-mata di dasarkan atas kerukunan dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah harta warisan.

#### A.1.4 LEMBAGA PENGGANTIAN TEMPAT

Harta benda keluarga dari semula digunakan sebagai dasar material kehidupan keluarga dan keturunannya. Konsekuensi dari alam pikiran tersebut, maka timbullah lembaga pengganti tempat atau lembaga hidup waris (*plaatsvervulling*). Apabila seorang anak meninggal dunia lebih dahulu daripada si peninggal warisan (ayahnya), dan anak tersebut meninggalkan anak-anak, maka cucu dari peninggal warisan ini secara bersama-sama menggantikan kedudukan orang tuanya dan berhak menerima bagian harta warisan kakek-neneknya.

Namun demikian para ahli waris tidak mempunyai hak mutlak terhadap bagian tertentu terhadap harta warisan karena Hukum Waris Adat disamping menganut dasar persamaan hak, tetapi juga menganut dasar kerukunan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Bertitik tolak pada hakikat fungsi harta warisan yaitu sebagai dasar materiel kehidupan somah bagi keluarga dan turunannya, maka Hukum Waris Adat mengenal pula "lembaga

penggantian waris". Lembaga penggantian waris adalah suatu lembaga, apabila seorang anak meninggal dunia mendahului pewaris (orang tua) dan anak tersebut mempunyai keturunan, maka anak dari yang meninggal dunia itu berhak mengganti kedudukan orang tuanya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan kakeknya.

Menurut Keputusan Mahkamah Agung No.391 K/Sip/1958 isinya antara lain adalah: Bahwa menurut Hukum Adat di Jawa yang berhak untuk menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari orang yang meninggalkan warisan adalah hanya keturunan dalam garis menurun, sedangkan suami atau isteri tidak berhak menggantikannya.<sup>19)</sup>

Demikian pula halnya, apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan, tetapi meninggalkan anak saudaranya (keponakan), maka keponakan itulah yang menggantikan tempat orang tuanya yang telah meninggal dunia itu. Dengan demikian lembaga penggantian tempat tidak hanya mengenal garis keturunan ke bawah saja, tetapi juga garis keturunan ke atas dan garis keturunan menyamping. Sedangkan bagian ahli waris pengganti tidak sama dengan orang yang digantikan tempatnya, karena tergantung kelompok (jumlah) orang yang menggantikan tempat orang tuanya.

Lembaga pengganti tempat ini dikenal, baik pada masyarakat bilateral, patrilineal, dan matrilineal. Sehingga bagi mereka yang berasal dari sistem bilateral yang menggantikan tempat adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Pada masyarakat patrilineal yang menggantikan tempat adalah

---

<sup>19)</sup> Ibid, hal. 10.



anak laki-laki. Sedangkan pada masyarakat matrilineal yang berhak menggantikan orang tuanya adalah anak perempuan.

## **A.2. PROSES PEWARISAN**

Proses pewarisan adalah merupakan suatu cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan kepada para ahli waris pada waktu pewaris masih hidup dan bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pewarisan yang berlangsung pada waktu masih hidup dapat berupa penerusan atau pengalihan, penunjukkan atau berupa pesan, wasiat (weling-Jawa). Proses pewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia dilakukan oleh janda atau anak tertentu (anak tertua), anggota keluarga yang lain. Sedangkan mengenai cara pembagian dapat berupa penangguhan pembagian (Jawa-gantungan) atau pembagian dilakukan dengan cara berimbang atau berbanding seperti hukum Islam.

### **a. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.**

#### **1. Penerusan atau peralihan harta warisan**

Masalah penerusan atau peralihan dalam proses pewarisan merupakan peralihan penguasaan dan pemilikan pada saat dinyatakan oleh pewaris. Proses penerusan atau peralihan biasanya berkaitan dengan masalah kedudukan, hak dan kewajiban serta hanya kekayaan yang tidak dibagi-bagikan dari pewaris kepada ahli waris, misalnya kepada anak laki-laki tertua di masyarakat Batak, anak laki-laki dan perempuan tertua di masyarakat Jawa; Hal mana kesemuanya itu

sudah berlaku secara tradisional dan pelaksanaannya berdasarkan musyawarah adat dan mufakat keluarga. Sehingga penerusan dan peralihan dapat digunakan gambarkan bilamana anak laki-laki yang mentas (berumah tangga) akan diberikan sawah oleh pewaris, sedangkan anak perempuan diberikan rumah, perhiasan ataupun alat rumah tangga. Oleh karena itu proses penerusan dan peralihan barang harta kekayaan suatu keluarga dimasyarakat desa merupakan *typisch* bagi masyarakat tradisional di Jawa.

Dengan demikian bahwa proses penerusan dan peralihan harta warisan terjadi pada waktu masih hidup. Proses ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual (masyarakat bilateral dan frekuensinya tergantung kepentingan dari masing-masing pihak. Sedangkan di Bali, pemberian harta pada saat pewaris masih hidup tidak dengan sendirinya merupakan pengalihan harta warisan. Pemberian harta tersebut kepada ahli waris semasa pewaris masih hidup berupa "jiwa dana" yaitu pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris dan pengupah jiwa hanya bersifat menikmati hasilnya harta warisan.

## **2. Penunjukkan.**

Penunjukkan dalam proses pewarisan itu berarti bahwa penguasaan dan pemilikan harta warisan belum beralih dan baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Sebelum pewaris meninggal dunia, harta warisan tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh

pewaris. Sedangkan ahli waris hanya mendapat penunjukkan atas harta warisan tertentu dari pewaris. Belum mendapatkan sesuatu ( harta warisan ), selain hak pakai dan hak menikmati hasilnya.

Penunjukkan tidak saja untuk barang bergerak tetapi juga untuk barang tetap seperti sawah, kebun yang disebut “ garisan”. Garisan artinya pewaris menunjukkan garis batas tanah yang diperuntukkan bagi ahli waris. Pelaksanaan penerusan maupun penunjukkan oleh pewaris kepada ahli waris tidak mesti dinyatakan dengan terang dihadapan pemuka desa tetapi pada umumnya hanya dihadapan ahli waris dan anggota keluarga yang lain.

### **3. Pesan atau wasiat**

Pesan atau wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta semasa hidupnya untuk menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini biasanya diucapkan pada waktu si pewaris dalam keadaan sakit keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya lagi atau diucapkan ketika pewaris akan bepergian jauh, misalnya : naik haji.

Pesan (welingan atau wekasan) itu baru berlaku, setelah pewaris tidak kembali lagi atau meninggal dunia. Namun jika pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halaman maka ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya itu.

Ada kalanya bagi seorang pewaris yang sudah berumur lanjut, atau karena sudah mulai sakit-sakitan, berpesan kepada para anggota keluarganya agar sebagian dari harta yang akan ditinggalkannya kelak apabila ia wafat dapat diberikan kepada seseorang. Pesan kewarisan itu disampaikan dengan lisan atau dengan tulisan di hadapan para anggota keluarganya dan pesan tersebut akan berlaku setelah pewaris tersebut wafat.

Pesan atau wasiat dari orang tua kepada ahli waris biasanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan pamong desa. Perbuatan pesan ini harus "terang" agar mendapat perlindungan dalam lintas hukum diluar lingkungan kerabat. Menurut Hukum Adat yang dapat menerima pesan adalah ahli waris. Soepomo mengemukakan bahwa "pewarisan atau hibah wasiat hanya merupakan perpindahan (*verschuiving*) harta benda didalam lingkungan ahli waris. Prinsip tersebut berkaitan dengan hibah yaitu :

1. Memberikan pernyataan mengikat terhadap sifat-sifat dari barang-barang yang akan menjadi harta peninggalan seperti harta asal, harta yang diperoleh sendiri ds. ....
2. Mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta peninggalan secara layak menurut anggapan pewaris dan untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam membagi harta peninggalan dikemudian hari.

“Welingan” atau “wekasan” pelaksanaannya kadang-kadang perlu disaksikan pamong desa dan para tetangga, terutama jika yang diweling itu adalah bidang tanah. Adanya kesaksian pamong desa tersebut dimaksudkan agar mudah menyelesaikan apabila di kemudian hari timbul sengketa warisan.

“Welingan barulah berlaku setelah pemberi welingan wafat dan selama pewasiat masih hidup ia berhak mencabut atau mengubah harta yang telah dihibah-wasiatkan. Di Jawa welingan berlaku terhadap istri, anak, anak angkat atau juga terhadap orang lain. Menurut yurisprudensi Landraad Surabaya tanggal 15 Maret 1923 (T. 121 : 585) dikatakan bahwa ‘Mengenai cara pembagian harta dengan hibah wasiat oleh ayah atas sebidang tanah untuk anaknya. Hibah wasiat ini dapat diterjemahkan sebagai pemberian dengan pengertian bahwa pemberian itu baru berlaku sesudah penghibah wafat. Jadi hak milik baru beralih pada anak setelah penghibah wafat.

Dalam pelaksanaan hibah wasiat itu tidak memerlukan adanya izin atau persetujuan dari para ahli waris dan tidak pula adanya hibah wasiat akan berakibat merugikan para ahli waris. Sebagaimana dikemukakan dalam putusan MARI tanggal 23 Agustus 1960 No. 225 K/Sip/1960 bahwa :

- a. hibah itu tidak memerlukan persetujuan ahli waris.
- b. hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari penghibah.

c. hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.

Di kalangan masyarakat Jawa yang disebut "*welingan*" atau "*wekasan*" atau juga disebut "*wasiat*" ialah merupakan pemebrian pesan dari pewaris ketika ia dalam keadaan sakit pada akhir hayatnya, mengenai apa yang ia kehendaki tentang harta peninggalannya kelak apabila ia telah wafat. Welingan itu dapat dilakukannya tertulis atau cukup dengan lisan, dapat disampaikan dengan kesaksian hanya para ahli waris dan para tua-tua desa. Kebanyakan welingan ini ditujukan pada waris seperti anak angkat, agar terhindar dari perselisihan harta peninggalan di kemudian hari.

Dalam penyampaian welingan itu dapat pula disampaikan pewaris bukan hanya secara lisan atau menulis di atas kertas (bermaterai) atau dilakukannya dengan cara yang disebut "*cungari*", yaitu penunjukan bendanya, atau "*garisan*" yaitu dengan menunjukkan bagian-bagian dari barangnya, misalnya mengenai barang-barang perhiasan, alat perlengkapan, ternak dan sebagainya. Kesemuanya itu baru berlaku setelah pewaris wafat.

Disamping itu dikenal pula suatu sistem pengalihan harta kepada para waris yang disebut "*lintiran*" (pengalihan), yaitu pemindahan dan pengalihan bendanya telah berlaku sejak pewaris masih hidup, malahan ketika pewaris masih kuat tenaganya. Sistem lintiran ini berlaku terutama yang sudah menjadi adat bahwa orang tua selalu menyediakan dan memberikan hartanya sebagai modal

kehidupan bagi setiap anaknya yang sudah kawin dan akan hidup mandiri. Jadi pengalihan hak miliknya sudah berlaku ketika pewaris masih hidup, baik terhadap anak kandung, atau terhadap anak angkat atau mungkin juga orang lain.

Menurut S.A. Hakim pemebrian harta itu ada dua syarat :

- a. harus diberikan kepada para ahli waris, terutama anak-anak atau keturunannya dan kadang-kadang juga kepada istri.
- b. bagian harta itu harus cukup untuk menjadi modal penghidupan dari yang mendapatkannya.

**b. Pembagian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia.**

Apabila seseorang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan maka masalah yang timbul adalah apakah harta itu akan dibagikan kepada ahli waris ataukah tidak akan dibagi-bagikan. Jika harta itu tidak dibagi-bagi, siapakah yang akan menguasai dan memiliki harta warisan itu dan jika harta itu dibagi-bagi, siapa yang akan mendapatkan bagian serta bagaimana pembagian itu dilaksanakan.

**1. Harta warisan yang tidak dibagi-bagikan.**

Penguaasaan harta peninggalan tidak dibagi-bagi karena harta itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan disebabkan alasan-alasan tertentu antara lain : masih ada orang tua, ahli waris belum dewasa, pewaris tidak mempunyai keturunan, atau terbatasnya jumlah harta peninggalan.

Harta warisan yang tidak dibagi-bagikan atau ditangguhkan pembagiannya, biasanya dikuasai oleh janda, anak ( tertua ), anggota keluarga lainnya dan tua-tua adat. Bagi yang menguasai harta warisan itu, bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan harta tersebut, baik berupa hutang maupun piutang serta pengurusan para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris untuk kelangsungan hidupnya.

Pada masyarakat bilateral, janda dapat menguasai harta warisan suami selama hidupnya atau pengalihan kepada anak-anak setelah dewasa atau berumah tangga. Bahkan kadang-kadang janda berperan sebagai pembagi harta warisan kepada anak-anaknya tanpa campur tangan orang lain. Sedangkan apabila janda tidak mempunyai anak, janda dapat menguasai harta warisan sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia ( Keputusan M.A. No. 298 K/Sip /1958, tanggal 29 Oktober 1958 ).

Pada masyarakat patrilineal, yang menganut sistem perkawinan jujur maka isteri masuk anggota kekerabatan suami dan janda tetap dapat menguasai serta menikmati warisan selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya. Namun apabila janda tidak mempunyai keturunan, ia dapat kawin lagi dengan saudara laki-laki suami atau dengan orang lain yang ditunjuk oleh kerabat sebagai pengganti suami untuk mendapatkan keturunan. Keturunan pada sistem masyarakat patrilineal merupakan hal yang



asasi karena sebagai penerus kekerabatan. Penguasaan harta warisan oleh janda akan berakhir apabila anak-anaknya sudah dewasa dan berumah tangga.

Pada masyarakat matrilineal, janda adalah mutlak menjadi pemilik atas harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi untuk kepentingan anak-anaknya. Pengelolaan harta ini dibantu dan diawasi oleh saudara laki-laki tertua si janda yang disebut "Mamak Kepala Waris".

## 2. Harta peninggalan yang dibagi-bagi.

Apabila seseorang meninggalkan dunia, maka persoalannya adalah sebagaimana harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris. Jika harta tersebut akan dibagikan, kapan dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan. Hukum Adat tidak menentukan kapan pembagian harta warisan itu dilakukan dan siapa yang menjadi juru baginya. Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia biasanya dilakukan setelah selamatan meninggalnya pewaris, misalnya : empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.

### c. Proses Meneruskan dan Mengalihkan Barang-barang Harta Keluarga

Proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada turunan keluarga itu, telah mulai selagi orang tua masih hidup. Agar segala sesuatu dapat menjadi jelas, maka kita mengambil sebagai contoh terdiri dari suami istri yang mempunyai dua anak lelaki dan dua anak perempuan.

Anak lelaki yang tertua telah dewasa, ia cakup bekerja (*kuar gawe*). Berhubung dengan itu bapaknya memberi (mengalihkan) sebidang sawahnya kepada anak tersebut. Pemberian itu bersifat mutlak, sawah akan dicatat didalam daftar tanah desa atas nama anak tersebut. Dengan pengalihan itu anak yang tertua mendapat suatu milik yang menjadi dasar materiil bagi kehidupannya.

Cara pemberian mutlak tersebut di atas bersifat suatu pewarisan (*toescheiding*), bukan suatu perjanjian jual, melainkan suatu perbuatan pengalihan harta benda didalam lingkungan keluarga.

Pewarisan sawah itu disaksikan oleh kepala desa supaya menjadi jelas. "Balik nama" sawah didalam daftar tanah desa dilakukan dengan persetujuan kepala desa.

#### **A.2.1. PENETAPAN HARTA KEKAYAAN SEMASA PEWARIS MASIH HIDUP**

Dapat berupa :

1. Pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris, Contoh : pewaris dengan dasar tulus ikhlas memberikan kepada anak/istri/anak angkat sewaktu mereka masih hidup berkumpul. Pemberian in bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya (hibah).
2. Pemberian sementara, artinya, pemberian untuk sementara dari harta warisan oleh pewaris pada waktu ia masih hidup kepada ahli warisnya. Harta ini sekedar untuk dinikmati hasilnya saja, sampai dikemudian hari diadakan pembagian warisan yang bersifat tetap.

Contoh : pemberian orang tua kepada anaknya yang baru menikah sedikit harta untuk bekal hidup.

3. Penetapan pembagian harta kekayaan yang bersifat sementara antara para ahli waris, sampai diadakan pembagian warisan secara tetap.

### A.2.2. SIFAT HUKUM ADAT WARIS

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses itu tidak menjadi 'akuut' oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang hanya sebagai fundamen.

Keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal si suami, barang-barang asal si istri serta barang-barang gono-gini suami istri. Segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan turunan dari keluarga itu.

“Mewarisi”, menurut anggapan tradisional orang Jawa bermakna mengalihkan harta keluarga kepada turunan, yaitu terutama kepada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan.

“Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah, meneruskan angkatan, meneruskan turunan (*generatie*). Berhubung dengan itu, harus harta bendanya orang itu (ibu-bapak) akan disediakan sebagai syarat-syarat perbendaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan turunan tersebut. Apabila suami-istri mendapatkan anak, maka perkawinan adalah tercapai. Segala harta keluarga dengan tidak mengindahkan asalnya, jadi barang asal suami, barang asal istri, maupun barang gono-gini, barang pencarian, akan diserahkan kepada anak-anak.

Perkara-perkara warisan yang timbul didalam praktek biasanya disebabkan oleh karena tidak ada anak. kadang-kadang juga oleh karena adanya perselisihan antara anak dan ibu tiri, atau juga oleh karena ada anak-anak yang dilahirkan oleh beberapa orang istri. Sifat dari hukum waris adat, nampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/ komunal, kebersamaan serta kongkrit bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotong-royongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi waris benar-benar mewarnai dari hukum waris adat. Jarang kita melihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (warisan) dibawa ke tingkat Pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak sedap kalau sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Pengertian dari penelitian adalah sebagaimana suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.<sup>20</sup>

Oleh karena itu berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara-cara untuk mencari dan mencapai kebenaran ilmiah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta untuk menguji kebenaran dari suatu penelitian

Metodologi merupakan salah satu faktor yang penting. Adanya metode penelitian ikut menunjang suatu proses penyelesaian masalah yang perlu dibahas. Yang dimaksud dengan metode yaitu suatu cara atau jalan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan alat-alat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian (research) adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan atau menguji suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>21</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna penulisan tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Jawa Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Di Kabupaten Karanganyar". Data yang dikumpulkan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pewarisan.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, Yayasan Fakuoltas Psikologi UGM, 1986.

### **A.1. SIFAT PENELITIAN**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dekatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia menurut hukum adat pada masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar. Sedangkan istilah analisis artinya data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui perkembangan hukum waris adat khususnya dalam masyarakat Jawa.

### **A.2. CARA PENDEKATAN**

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap data sekunder yang bersifat publik, yaitu yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, data yang dipublikasikan, misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung serta pendapat para ahli yang menyangkut masalah-masalah pewarisan adat. Pendekatan secara empiris dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan hukum waris pada masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar.

---

<sup>21</sup> HB. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press-Surakarta, 1999.

## **B.2. LOKASI PENELITIAN**

Tempat penelitian diadakan di kabupaten Karanganyar. Penulis menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah penelitian karena di kabupaten memungkinkan untuk diteliti dalam proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia.

## **A.4. JENIS PENELITIAN**

Data Primer dan Sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan survei lapangan.

### **1. Studi Kepustakaan.**

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji didokumen-dokumen yang ada ( kajian dokumen), yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :**

- 1). Norma dasar Pancasila
- 2). Buku-buku
- 3). Bahan hukum yang tidak dikondifikasikan.
- 4). Yurispredensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pewarisan.
- 5). Sema, Fatwa MA
- 6). Ensiklopedia Indonesia

#### **b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer tadi dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :**

- 1). Literatur-literatur yang berkaitan dengan pewarisan.
  - 2). Hasil karya ilmiah para sarjana
  - 3). Hasil-hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :

Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

## 2. Studi Lapangan

Sesuai dengan judul tesis ini maka wilayah penelitian lapangan adalah kabupaten Karanganyar. Dari penelitian lapangan diperoleh data primer dari responden. Dan Primer ini merupakan pengalaman atau pendapat dari para responden tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pewarisan menurut hukum adat pada masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar.

Studi lapangan dilakukan dengan cara :

### a. Populasi

Sebelum sampai pada penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan populasinya. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>20)</sup> Dengan mendasarkan pada pengertian populasi diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pewarisan pada masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar,

---

<sup>20)</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi terhadap hukum*, PT. Bima Aksara, Jakarta, 1988



termasuk juga para ahli yang dapat dijadikan sebagai nara sumber yang dianggap mampu memberikan pandangan mengenai pewarisan menurut Hukum Adat pada masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar.

b. Teknik Sampling

Sehubungan dengan besar dan luasnya populasi, maka dalam penelitian akan diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan menggunakan metode induksi.

Metode induksi adalah suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dan cara meneliti semua bukti-bukti dengan menggunakan teknik purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan, yaitu kabupaten Karanganyar. Dengan dasar tersebut, maka sampel dalam penelitian ini dipilih Desa yang banyak melakukan pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu :

1. Kecamatan Jaten terpilih : Desa Ngringo, Desa  
Brujul, Desa jetis
2. Kecamatan Colomadu terpilih : Desa Gedongan  
Desa Klodran, Desa  
Malang Jiwan.
3. Kecamatan Kebak kramat terpilih : Desa Kemiri, Desa  
Pulosari, Desa  
Kaliwuluh.

c. Lokasi Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan penelitian empiris maka data primer yang dihasilkan akan diketahui. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan kepada kepala keluarga sebagai unit sampling dalam masyarakat Jawa di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dibagi dalam 4 Wilayah Kerja Pembantu Bupati, yaitu :

- a). Wilayah Kerja Pembantu Bupati Wonoharjo, meliputi Kecamatan Colomadu, dan Gondangrejo.
- b). Wilayah Kerja Pembantu Bupati Karanganyar, meliputi Kecamatan Mojogedang Karanganyar, Jaten, Tasikmadu dan Kebakkramat.
- c). Wilayah Kerja Pembantu Bupati Karang Pandan, Jenawi, Matesih, Karang Pandan, Tawangmangu dan Ngargoyoso.
- d). Wilayah Kerja Pembantu Bupati Jumapolo, meliputi Kecamatan Jumapolo, Jumantono, Jatisoyo, Jatipuro.

Tiap-tiap kecamatan dipilih masing-masing 3 (tiga) desa secara purposive, sehingga ada 9 desa yang menjadi lokasi penelitian.

d. Responden

Tiap-tiap desa itu diambil 12 (dua belas) responden yang terdiri dari 4 (empat) responden yang melakukan pewarisan dan 8 (delapan) responden yang pernah menerima harta warisan.

Sehingga jumlah responden seluruhnya adalah : 178 orang yaitu 58 orang untuk responden pewaris dan 120 orang untuk ahli waris.

Disamping responden tersebut diatas, juga ada beberapa nara sumber yaitu : 9 orang pemuka masyarakat. Penentuan responden/subyek penelitian dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subyek didasarkan pada ciri-ciri atas sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

#### **A.5. METODE PENGUMPULAN DATA**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan 2 ( dua ) jenis data, yaitu :

###### **a. Data Primer**

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya.

###### **b. Data Sekunder.**

Yaitu data yang tidak langsung dari sumbernya dan data dokumen yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Misalnya : dari kepustakaan, buku-buku, hasil penelitian para sarjana, yurisprudensi Mahkamah Agung.

#### **A.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner yang dibagikan kepada

responden tersebut dan wawancara langsung dengan orang yang berkompeten yaitu : pemuka masyarakat yang lebih mengetahui masalah pewarisan dibanding masyarakat biasa.

Kuesioner terbentuk kombinasi antara jawaban tertutup dan jawaban terbuka. Kuesioner diperuntukkan 3 ( tiga ) kelompok yaitu : pewaris, ahli waris, dan kepala desa. Tipe kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus berisikan jawaban-jawaban sebagai pilihan. Disamping itu memberikan pula kemungkinan-kemungkinan kepada responden untuk mengisi jawaban diluar pilihan jawaban yang tersedia. Sehingga dengan demikian dapat menjangkau informasi diluar jawaban-jawaban yang tersedia dalam kuesioner tersebut.

Kuesioner tersebut berisikan identitas responden (jenis kelamin, umur, pekerjaan, status perkawinan, agama dan jabatan atau status), waktu pelaksanaan pewarisan, siapa yang membagi warisan, siapa yang menyelesaikan apabila ada sengketa, cara membagi warisan, bentuk warisan, siapa yang menerima warisan, bagian warisan yang diterima, anak angkat dan wasiat.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara yang berpedoman, artinya penelitian telah mempersiapkan bahan-bahan (pertanyaan) yang akan ditanyakan kepada responden. Pertanyaan pedoman (interview guide) berisi proses pewarisan, harta warisan, ahli waris dan penyelesaian sengketa.

#### A.7. JALANNYA PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti dibantu oleh 3 tenaga lapangan untuk mengunjungi 178 responden dari 9 desa yang dikunjungi secara bergiliran. Sedangkan khusus untuk wawancara dilaksanakan sendiri oleh peneliti, agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pewarisan. Untuk mempermudah pelaksanaan ini, diadakan pendekatan dengan bantuan maupun petunjuk terlebih dahulu dari Kepala Desa setempat.

Dari tiap desa lebih banyak dijumpai mereka yang telah menerima warisan, dibandingkan mereka yang melakukan pewarisan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan jumlah responden ahli waris 2 kali jumlah responden pewaris yaitu 4 orang responden pewaris dan 8 orang responden ahli waris dari tiap-tiap desa. Hasil kuesioner tersebut kemudian dipadukan dengan keterangan dari hasil wawancara, sehingga didapatkan persesuaian. Dengan demikian dapat diketahui lebih jelas keadaan yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran nyata dan inilah yang merupakan data primer. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih lengkap dan mendalam.

#### **A.8. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN.**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu :

##### **1. Tahap Persiapan.**

Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, studi awal tentang bahan kepustakaan tersebut, pra survei yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian yang dikonsultasikan dengan pembimbing yang dilanjutkan dengan seminar proposal. Selanjutnya dilakukan penyusunan kuisisioner, daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara dan mengurus ijin penelitian.

##### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pengkajian lebih lanjut tentang bahan kepustakaan baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier adalah langkah awal pada tahap pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan responden dan pengumpulan data berdasarkan kuesioner dan wawancara dengan pedoman wawancara. Hal terakhir yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis data serta membicarakannya dengan pembimbing.

##### **3. Tahap Penyelesaian.**

Tahap ini dilakukan dengan menyusun tesis yang kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing bab demi bab. Konsultasi dilakukan secara kontinyu sehingga diperoleh banyak masukan dalam penyusunan selanjutnya.

#### A.9. TEHNIK ANALISA DATA.

Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat diskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sebagai sesuatu yang utuh. dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada, kenyataan-kenyataan yang ada.<sup>22</sup>

Sanapiah Faisal menyatakan banyak hal-hal yang dapat diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, kenyataan, tingkah laku sosial dan budaya.<sup>23</sup>

Selain hal-hal tersebut diatas penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

1. Mudah dalam penyelesaiannya jika berhadapan dengan kenyataan ganda;
2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan penelitian dan responden;
3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

---

<sup>22</sup> Patton Dalam Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Cet Kedua, Bandung, 1999, hal. 179.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, op. cit, Hal. 12  
Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.<sup>24</sup>

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PENDAHULUAN

Kedudukan Geografis Kabupaten Karanganyar sangat strategis, karena terletak pada jalur jalan propinsi yang menghubungkan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta dan pusat wisata Tawangmangu. Karanganyar akan menjadi wilayah yang berkembang karena dilalui jalur jalan Surakarta dengan pusat wisata Tawangmangu. Adapun jaraknya dengan kota Surakarta cukup dekat kurang lebih 15 Km, dengan pengembangan wilayah Palur yang menjadi sentra industri tekstil dan industri menengah lainnya, membuat Karanganyar memiliki basis industri yang berdampak terhadap pengembangan sektor industri kecil dan menyedot tenaga kerja cukup banyak.

Wilayah Kabupaten Karanganyar bagian barat, khususnya kecamatan Jaten dan Kebakkramat yang menjadi wilayah industri, memberi dampak terhadap kebutuhan tanah untuk lahan industri yang makin bertambah. Wilayah kecamatan Jaten dan Kebakkramat merupakan daerah yang berkembang paling pesat di Kabupaten Karanganyar, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian serta pengembangan wilayah. Kedua kecamatan itu memberi nilai tambah berupa potensi besar untuk berkembang dan maju, yaitu seiring dengan Kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah eks Karesidenan Surakarta.

Hal ini terlihat dengan adanya kecenderungan pemekaran Kabupaten Karanganyar menuju Solo-Sragen yang lebih pesat dibanding pemekaran wilayah ke arah selatan dan utara yang lebih bernuansa sebagai kawasan pertanian. Manfaat lain dengan adanya jalur lintas Kabupaten tersebut adalah kemudahan untuk mencapai melalui jalur darat dari dan menuju Kabupaten Karanganyar.

#### A.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sebagai daerah Kabupaten, Karanganyar terbagi menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan terdiri dari : Jenawi, Kerjo, Gondangrejo, Colomadu, Tasikmadu, Jumapolo, Jaten, Jumantono, Mojogedang, Karangpandan, Tawangmangu, Karanganyar, Matesih, Ngargoyoso, Kebakkramat, Jatiyoso dan Jatipuro.  $\pm 177$  Desa/Kelurahan dan 2.313 dukuh, Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar seluas 77.378.6374 Ha yang terletak antara  $110^{\circ} 40' - 110^{\circ} 70'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 28' - 7^{\circ} 46'$  Lintang Selatan, adapun batas daerahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
4. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar menurut data Statistik tahun 2002 sebanyak 813.871 orang yang terdiri dari 402.519

laki-laki dan 411.352 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 195.654.

Menurut jenis penggunaannya sebagian besar wilayah Kabupaten Karanganyar terdiri dari tanah sawah yaitu sekitar 22.912,4996 Ha atau sekitar 29,61 % dari luas wilayah seluruhnya. Adapun uraian luas wilayah penggunaan tanah untuk masing-masing penggunaan sebagai berikut :

1. Tanah sawah	: 22.912, 4996 Ha
2. Tanah Pekarangan	: 20.569, 9468 Ha
3. Tanah Tegalan	: 17.976, 6868 Ha
4. Tanah Padang Gembala	: 257, 2537 Ha.
5. Tambak/Kolam	: 25, 0934 Ha
6. Hutan Negara	: 9.729,4995 Ha
7. Perkebunan	: 3.251,5006 Ha
8. Lain-lain	: 2.656.2070 Ha.

### **Tinjauan Umum Responden**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang :

- a. Jenis-jenis responden
- b. Keadaan responden

Berikut ini akan diuraikan hal-hal tersebut di atas.

- a. Jenis-jenis responden.

Pada bab III telah dikemukakan bahwa jumlah responden yang dipilih adalah 187 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Pewaris dan Ahli Waris. Adapun jenis-jenis responden dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1  
JENIS RESPONDEN

N = 187

NO.	RESPONDEN	f	%
1	Kepala Desa	9	4,81
2	Pewaris	58	31,01
3	Ahli Waris	120	64,18
	JUMLAH	187	100

Sumber: Data Primer 2003

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang berasal dari Kepala Desa paling sedikit jumlahnya yaitu 9 orang, sesuai dengan jumlah Desa yang dijadikan sampel penelitian. Kemudian responden pewaris yang berjumlah 58 orang, sebab pada saat dilakukan penelitian jumlah responden yang telah melakukan tidak banyak. Di samping itu pada umumnya pewarisan dilakukan pada saat pewaris menginjak usia tua. Sedangkan yang paling banyak dijumpai pada saat penelitian dilakukan adalah golongan ahli waris yaitu 120 orang.

#### A.1.1. KEADAAN RESPONDEN.

Mengenai masalah ini, hanya akan dikemukakan keadaan sosial ekonomi responden pewaris dan ahli waris saja. Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan responden perlu diuraikan yaitu mengenai jenis kelamin, umur, dan pekerjaan mereka.

## 1). Jenis kelamin.

Adapun jenis kelamin dari jumlah responden pewais dan ahli waris adalah 170 pria terdiri dari 58 pewaris dan 112 ahli waris, sedangkan jumlah responden wanita 8 orang ahli waris.

## 2). Umur responden.

Batasan umur yang dijadikan responden dalam penelitian ini yang termuda adalah 21 tahun. karena dianggap sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Pengelompokan umur responden tersebut di atas didasarkan bahwa pada umur-umur tersebut responden sudah dewasa. Sehingga diharapkan responden seumur itu dapat memberikan informasi yang akurat dan kemungkinan mereka telah melangsungkan perkawinan serta mendapatkan bekal (modal) dari warisan orang tuanya. Apabila dikelompokan dengan interval 10 tahun, maka jumlah masing-masing kelompok sebagai terlukis di bawah ini :

Tabel 2  
UMUR RESPONDEN  
N = 178

NO	KELOMPOK	RESPONDEN		f	%
		PEWARIS	AHLI WARIS		
1.	21 – 30 Tahun	2	15	17	9,55
2.	31 – 40 Tahun	1	33	34	19,10
3.	41 – 50 Tahun	7	30	37	20,79
4.	51 – 60 Tahun	25	28	53	29,78
5.	61 – 70 Tahun	19	13	32	17,98
6.	71 – Ke atas	4	1	5	2,80
JUMLAH		58	120	178	100,00

Sumber : Data Primer 2003

Dilihat secara keseluruhan (pewaris dan ahli waris) pada tabel tersebut di atas maka jumlah responden yang terbanyak adalah yang berada pada kelompok umur 51 sampai dengan 60 tahun yaitu 53 orang. Dari 51 orang tersebut, 25 orang adalah merupakan jumlah terbanyak dari golongan pewaris, sedangkan 28 orang dari golongan ahli waris tidak merupakan jumlah terbesar dari kelompok umur tersebut dari golongannya. Hal ini disebabkan bahwa pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia pada umumnya dilakukan pada waktu orang tua (pewaris) menjelang usia lanjut. Sedangkan pada golongan ahli waris yang menerima harta warisan pada umumnya terjadi bukan saat melangsungkan perkawinan melainkan jauh setelah perkawinan dilangsungkan adalah kelompok umur antara 31 - 40 tahun yaitu 33 orang.

Kelompok umur yang paling sedikit responden secara makro adalah berada pada posisi 71 tahun ke atas. Namun apabila dilihat perseroan golongan responden golongan responden pewaris jumlah yang paling sedikit adalah kelompok 31 tahun sampai dengan 40 tahun yaitu 1 orang. Hal ini terjadi karena responden tersebut melakukan pembagian warisan beberapa saat setelah berlangsungnya perkawinan anak-anaknya. Sedangkan untuk golongan ahli waris adalah kelompok umur 71 tahun ke atas yaitu 1 orang.

### 3). Pekerjaan Responden.

Jenis pekerjaan responden ini bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3  
PEKERJAAN RESPONDEN  
N = 178

NO	PEKERJAAN	RESPONDEN		F	%
		PEWARIS	AHLI WARIS		
		51	62	111	62,36
1.	Petani				
2.	Buruh	2	-	2	1,12
3.	Nelayan	1	-	1	0,56
4.	Pedagang	-	8	8	4,49
5.	Wiraswasta	-	13	13	7,30
6.	Pegawai Swasta	-	14	14	7,87
7.	Pegawai Negeri/ ABRI	2	12	14	7,87
8.	Pensiunan Pegawai Negeri/ ABRI	2	13	15	8,43
JUMLAH		58	120	178	100,00

Sumber : Data Primer, 2003

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa kedua golongan responden hampir 70 persen adalah petani, yaitu 111 orang. Demikian pula jumlah yang terkecil adalah nelayan, pegawai negeri atau ABRI dan pensiunan pegawai negeri atau ABRI, masing-masing 2 orang.

Mengenai agama responden pewaris dan ahli waris seluruhnya adalah beragama Islam.

## **B.1. PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT JAWA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.**

Dalam menganalisa hasil penelitian tentang Pewarisan kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat pada masyarakat Jawa di Kabupaten Karanganyar, akan dibahas unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan pewarisan antara lain proses pewarisan, Harta Warisan, cara pembagian harta warisan dan ahli waris.

Pemikiran tersebut bertitik tolak pada asumsi bahwa masyarakat beragama Islam dalam bidang hukum, seharusnya mengikuti Hukum Agama termasuk Hukum Waris. Apakah dalam kenyataan demikian, hal ini akan terbukti dari hasil penelitian.

### **B.1.1. PELAKSANAAN PEWARISAN.**

Menurut Hukum Adat, pewarisan merupakan suatu proses peralihan atau pengoperan harta warisan dari waris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian proses pewarisan menurut Hukum adat merupakan dua tahap yaitu tahap regenerasi harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup dan tahap regenerasi harta kekayaan pada waktu pewaris sudah meninggal sudah meninggal dunia.



Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang essensial dalam Hukum Waris Adat. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu yang nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh dalam proses pewarisan, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut.

Hal ini berbeda dengan Hukum Waris Islam, bahwa proses pewarisan hanya berfokus pada satu tahap regenerasi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Sehingga kematian pewaris merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam proses pewarisan dan berpengaruh pada peralihan dan pengoperan harta warisan. Oleh karena itu pada masyarakat yang warganya beragama Islam, seharusnya proses pewarisan yang pada masyarakat adat kabupaten Karanganyar tersebut adalah tahap regenerasi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat desa di kabupaten Karanganyar lebih dari separo responden ahli waris yang berjumlah 120 orang yaitu 72 orang atau 60,00 persen menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup. begitu nampak, sebagian besar pernyataan

hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, tingkah kelakuannya ditentukan oleh berbagai adat, aturan, ketetapan dari kesatuan sosial yang meliputi segala lapangan kehidupan Masyarakat desa dianggap bersifat kolektivitis ini bukan berarti bahwa sifat individualitis tidak ada sama sekali.

Sifat kebersamaan dalam kolektivisme ini adalah merupakan unsur penting dalam tata kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sehingga sifat kebersamaan ini berakibat bahwa ahli waris tidak lagi mempersoalkan sama atau tidaknya mengenai pembagian warisan yang diterima, akan tetapi yang diutamakan adalah rasa kerukunan di antara para ahli waris.

Pelaksanaan peralihan dan pengoperan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi "saat itu" artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasainya secara langsung. Di samping itu atas harta warisan hanya "mengolah" yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki dan pewaris, sedangkan ahli waris hanya disertai hak pemanfaatan atau pengelolaan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah "ditunjuk" artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya mengenai kedudukan masing-masing unsur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tebel 4.

PROSES PEWARISAN

AHLI WARIS (N = 120)

NO.	RESPONDEN	F	%
1	Sebelum pewaris meninggal dunia	72	60,00
2	Sesudah pewaris meninggal dunia	47	39,17
3	Sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia	1	0,83
	J U M L A H	120	100

Sumber : Data Primer, 2003

Berdasarkan data pada tabel 4 tersebut, menunjukkan bahwa proses pewarisan masih didominasi oleh tradisi yang telah dianut secara turun temurun. Hal ini disebabkan kuatnya pandangan masyarakat desa terhadap suatu kebiasaan yang telah ada dan dianggap baik. Di samping itu proses pewarisan ditentukan pula oleh sikap dan tindakan orang tua (pewaris) dalam menentukan peralihan dan pengoperan harta warisannya. Sikap dan tindakan orang tua itu timbul dari rasa kekawatiran sesuatu hal yang mungkin terjadi di antara ahli waris dengan adanya harta warisan.

Faktor "Menghindari perselisihan antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia" nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua (pewaris) melakukan pembagian harta warisan. Struktur masyarakat desa Karanganyar yang agraris bersifat paguyuban (*gemeinschaftlich*) yang merupakan ciri khas masyarakat desa di

Indonesia. Tata kehidupan masyarakat desa kabupaten Karanganyar lebih bersifat kolektivitis. dengan indikasi-indikasi tertentu yaitu pengaruh terhadap kepribadian tidak begitu nampak, sebagian besar pernyataan hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, tingkah kelakuannya ditentukan oleh berbagai adat, aturan, ketetapan dari kesatuan sosial yang meliputi segala lapangan kehidupan Masyarakat desa dianggap bersifat kolektivitis ini bukan berarti bahwa sifat individualitis tidak ada sama sekali.

Sifat kebersamaan dalam kolektivisme ini adalah merupakan unsur penting dalam tata kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sehingga sifat kebersamaan ini berakibat bahwa ahli waris tidak lagi mempersoalkan sama atau tidaknya mengenai pembagian warisan yang diterima, akan tetapi yang diutamakan adalah rasa kerukunan di antara para ahli waris.

Pelaksanaan peralihan dan pengoperan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi "saat itu" artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasainya secara langsung. Di samping itu atas harta warisan hany "mengolah" yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki dan pewaris, sedangkan ahli waris hanya diserahi hak pemanfaatan atau pengelolaan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah "ditunjuk" artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah

akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya mengenai kedudukan masing-masing unsur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.

## PERALIHAN HARTA WARISAN

PEWARIS (N = 58)

NO.	RESPONDEN	f	%
1	Saat itu	40	68,97
2	Hak mengolah	10	17,24
3	Ditunjuk	8	13,79
	JUMLAH	58	100

Sumber : Data Primer, 2003

Berdasarkan data pada tabel tersebut, bahwa proses peralihan dan pengoperan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yang berlaku di masyarakat kabupaten karanganyar berlangsung seketika menunjukkan jumlah terbanyak. Dari 58 responden pewaris, 40 responden atau 68,97 persen menyatakan hak penguasaan dan hak pemilikan harta warisan beralih seketika yaitu harta warisan diserahkan beserta pemisahan atau pemecahan hak yang terdaftar dalam buku leter C di Kantor Desa apabila harta tersebut berupa sawah atau tanah.

Mengenai peralihan dan pengoperan harta warisan yang berupa "hak penguasaan". menunjukkan jumlah yang tidak begitu banyak, yaitu 10 responden atau 17,24 persen. Dengan hanya menyerahkan hak penguasaan saja oleh pewaris berarti belum ada penyerahan secara nyata harta warisan itu, karena ahli waris ada yang belum dewasa. Kekawatiran

pewaris timbul akibat adanya penyerahan hak penguasaan harta warisan tersebut adalah

1. Ahli waris tidak mengelola atau menggunakan harta warisan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan.
2. Adanya kemungkinan tergodanya ahli waris untuk menjual harta warisan itu.
3. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang mendesak dan memerlukan biaya besar.

Sehingga dengan adanya hak milik warisan belum beralih, maka pewaris masih dapat mengambil kembali harta tersebut.

Penunjukkan sebagai salah satu cara terakhir dalam proses peralihan dan pengoperan harta warisan, nampaknya di masyarakat kabupaten karanganyar menunjukkan jumlah yang paling sedikit yaitu 8 responden atau 13,79 persen.

Perbuatan penunjukkan ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menyatakan suatu wasiat atau was (Jawa). Dan penyerahan itu dilakukan secara lisan dihadapan isteri, anak-anak dan keluarga dekat. Motivasi adanya penunjukkan dalam proses pewarisan adalah suatu usaha untuk mencegah perselisihan antar ahli waris. Disamping itu agar pembagian itu memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris. Namun demikian, penunjukkan sebagai salah satu cara proses pewarisan tidak banyak digunakan oleh masyarakat kabupaten karanganyar sebab jumlah warisan

sedikit dan pewaris memerlukan dan para ahli waris belum membutuhkan sekali terhadap harta warisan tersebut.

Mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi "Pada saat anak-anak sudah dewasa" karena dianggap sudah mampu dan untuk melatih mengelola sendiri harta warisan serta mempersiapkan perkawinan. Di samping itu harta diberikan "Pada saat anak-anak melangsungkan perkawinan" artinya apabila salah satu anak akan melangsungkan perkawinan diberikan sebagian dari harta warisan yang merupakan modal dasar untuk memasuki kehidupan baru. Sedangkan yang terakhir harta warisan dapat diberikan "Setelah anak melangsungkan perkawinan" dengan suatu asumsi harta warisan tersebut akan digunakan untuk lebih memperkuat tata kehidupan rumah tangga. Agar mendapat gambaran yang jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS  
MENINGGAL DUNIA  
AHLI WARIS (N = 74)

NO.	RESPONDEN	f	%
1	Pada saat dewasa	14	18,92
2	Pada saat melangsungkan perkawinan	19	25,68
3	Setelah melangsungkan perkawinan	41	55,41
	J U M L A H	74	100

Sumber :Data Primer, 2003

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa dari 74 responden ahli waris yang menerima harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. 41 responden atau 55,41 persen menyatakan ia menerima harta warisan setelah beberapa saat melangsungkan perkawinan, merupakan jumlah terbanyak. Sedangkan jumlah terkecil adalah responden yang menerima harta warisan pada saat ahli waris dewasa yaitu 14 responden atau 18,92 persen. Dengan gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, paling banyak terjadi setelah ahli waris melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan fungsi harta keluarga yaitu untuk kepentingan anggota keluarga termasuk anggota keluarga yang akan meninggalkan keluarga. Hal itu dapat dimengerti, karena memulai hidup berumah tangga sendiri memerlukan modal yang tidak sedikit, apalagi belum mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan pokok sendiri.

Oleh karena itu harta warisan yang diterima oleh Ahli Waris pada saat dewasa paling sedikit jumlahnya karena kedewasaan ahli waris belum menjamin kelangsungan harta warisan. Hal ini menimbulkan rasa khawatir dari pewaris, apabila harta tersebut habis dijual oleh ahli waris. Sehingga pada gilirannya akan menyusahkan pula baik dirinya sendiri, ahli waris yang lain, maupun pewaris.

Pelaksanaan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia, 35 responden atau 56,45 persen dilakukan setelah upacara selamatan 1000 harinya kematian pewaris, 16 responden atau 25,81 persen setelah upacara



selamatan 100 hari kematian pewaris dan 5 responden atau 10,64 persen setelah upacara selamatan 40 hari kematian pewaris. Pembagian harta warisan pada upacara selamatan kematian pewaris, karena pada saat itu para ahli waris sedang berkumpul di rumah orang tua (pewaris).

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa proses peralihan dan pengoperan harta warisan dilakukan setelah upacara selamatan 1000 (seribu) harinya kematian pewaris menunjukkan jumlah terbanyak yaitu 35 responden atau 56,45 persen sebab antara lain pada saat itu suasana duka yang meliputi keluarga pewaris sudah hilang. Selamatan kematian untuk kematian seseorang pada umumnya sudah selesai. Jadi sudah tidak memerlukan biaya lagi dan harta warisan sudah bebas dari beban yang ada. Dengan keadaan demikian musyawarah keluarga dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya akan membawa tetap berlangsungnya hidup keluarga mereka.

Dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh janda, musyawarah para ahli waris dengan petunjuk ulama atau kepala desa, dan lain-lain, yang termasuk "Lain-lain" adalah saudara tua dan paman. Selanjutnya untuk mendapat gambaran lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SETELAH PEWARIS  
MENINGGAL DUNIA  
AHLI WARIS (N = 46)

NO	PELAKU PEMBAGIAN HARTA WARISAN	f	%
1	Janda	10	21,73
2	Musyawarah ahli waris dengan petunjuk ulama/ Kepala Desa	30 6	65,21 13,04
3	Lain-lain		
	JUMLAH	46	100

Sumber : Data Primer, 2003.

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut, menunjukkan bahwa dari 46 responden ahli waris yang menerima harta warisan setelah pewaris meninggal dunia (tabel 5), 30 responden atau 65,21 persen menyatakan proses pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah antar para ahli waris dengan saran dan petunjuk pihak ketiga.

Janda sebagai pembagi harta warisan, pada umumnya terjadi apabila pada waktu pewaris sudah meninggal dunia anak-anak (ahli waris) masih kecil-kecil atau belum dewasa, sehingga masih memerlukan bersatunya harta warisan. oleh karena itu sambil menunggu anak-anak dewasa atau berumah tangga harta warisan diurus dan dikelola oleh janda. Janda sebagai pembagi harta warisan karena di samping anak-anak belum

dewasa pada waktu pewaris meninggal dunia, juga jumlah harta yang akan diwariskan sedikit.

Sehingga harta tersebut dikuasai oleh janda untuk menjamin kehidupan diri sendiri bersama anak-anak. Selama menguasai harta warisan yang belum dibagi-bagi, janda berwenang memindahkan hak atas harta warisan karena keperluan yang mendesak. Apabila anak-anak sudah mencapai usia dewasa dan mereka dianggap cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dengan pihak ketiga, maka sewajarnya kekuasaan sang ibu digantikan seluruhnya oleh anak-anak.

Sedangkan cara yang terakhir sebagai pelaku pembagi harta warisan, adalah cara "Lain-lain". Cara ini menyangkut pembagian yang dilakukan oleh ahli waris lain di luar ahli waris utama, misalnya paman ahli waris, modin dan sebagainya, yang masuk klasifikasi "Dan lain-lain". Cara yang ketiga ini terjadi apabila janda merasa tidak mampu melakukan pembagian harta warisan atau janda sudah meninggal dunia.

# **1. Pembagian Harta warisan.**

## **1) Harta Warisan.**

Mengenai harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris di kalangan masyarakat desa adalah harta asal, harta bersama dan harta asal dan harta bersama. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8

## ASAL HARTA WARISAN (N = 178)

NO	ASAL HARTA WARISAN	RESPONDEN		f	%
		PEWARIS	AHLI WARIS		
1.	Harta Asal	12	50	62	34,83
2.	Harta Bersama	17	33	50	28,09
3.	Harta Asal Dan Harta Bersama	29	37	66	37,08
JUMLAH		58	120	178	100

Sumber : Data Primer, 2003

Dari data ini (tabel 8) dapat dilihat, bahwa harta yang paling banyak diwariskan kepada ahli waris berasal dari harta asal dan harta bersama merupakan jumlah terbanyak yaitu 66 responden atau 37,08 persen, walaupun perbedaan antara cara yang satu dengan yang lain tidak berbeda jauh. Namun apabila dirinci setiap golongan responden tampak berbeda jumlah asal harta warisan. Golongan terbesar responden pewaris menyatakan harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris adalah harta asal dan harta bersama, yaitu 29 responden atau 50,00 persen. Sedangkan harta warisan yang berasal dari harta asal menunjukkan jumlah responden terkecil yaitu 12 responden atau 20,69 persen. Hal ini berbeda dengan golongan terbesar responden pewaris menyatakan harta warisan berasal dari harta asal yaitu 50 responden atau 41,67 persen. Sedangkan golongan terkecil responden menyatakan harta yang diwariskan berasal dari harta bersama yaitu 33 responden atau 27,50 persen. Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat secara keseluruhan bahwa pada umumnya ( $\pm$  70 persen)

harta yang diwariskan setiap keluarga terdapat harta asal dari leluhurnya. Jumlah harta ini sangat besar dibandingkan dengan jenis harta yang lain.

Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, sebagian besar dipandang hanya semata-mata bernilai ekonomis, tetapi nilai ekonomis tersebut nampaknya tidak bersifat matematik dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris dapat berupa uang, atau uang dari hasil penjualan harta warisan, kesatuan benda dan kesatuan benda yang dinilai uang.

Untuk mendapat gambaran lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 9

## BENTUK HARTA WARISAN

N = 178

No	Jenis Harta Warisan	Responden		f	%
		Pewaris	Ahli Waris		
1.	Uang/ uang hasil penjualan harta warisan	8	7	15	8,43
2.	Kesatuan benda (sawah, rumah)	50	94	144	80,90
3.	Kesatuan benda yang dinilai dengan uang	10	9	19	10,67
	Jumlah	68	110	178	100

Sumber : Data Primer, 2003

Data pada tabel 9 tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat desa di Kabupaten Karanganyar, harta warisan yang diterima oleh ahli waris atau yang diwariskan oleh pewaris adalah “Kesatuan benda”, menunjukkan jumlah terbanyak yaitu 144 responden atau 80,90 persen. Kesatuan benda yang dimaksud adalah sawah rumah, ladang, sawah atau bentuk natura lainnya. Sedangkan cara yang lain jumlahnya relatif kecil, yaitu untuk “uang atau uang hasil penjualan harta warisan” adalah 15 responden atau 8,43 persen dan “kesatuan benda yang dinilai uang” adalah 19 responden atau 10,67 persen.

Dengan demikian menunjukkan bahwa masyarakat desa kabupaten Karanganyar dalam pembagian harta warisan masih memperhatikan asas kerukunan dan kebersamaan diantara para ahli waris dan tidak bersifat individualistik. Sifat yang tidak individualistik ini pada masyarakat kabupaten Karanganyar tampak bahwa, bagian harta warisan yang diterima tidak selalu sama atau hampir sama dari masing-masing ahli waris.

## **2) Ahli Waris**

Pada prinsipnya ahli waris adalah orang-orang yang ada hubungan darah dengan pewaris. Diantara mereka ada ahli waris utama yaitu anak kandung (keturunan langsung pewaris). Oleh karena itu janda adalah bukan ahli waris, demikian pula dalam yurisprudensi (Keputusan Raad Yustisio Jakarta 13 Mei 1939). Akan tetapi yurisprudensi setelah kemerdekaan menetapkan bahwa janda adalah

ahli waris (Keputusan Mahkamah Agung No. 110 K/ Sip/ 1960). Keputusan Mahkamah Agung itu sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, tetapi ada sebagian masyarakat masih menganggap janda bukan ahli waris. Demikian pula kenyataan yang masih hidup dalam masyarakat di kabupaten Karanganyar.,

Meskipun janda bukan ahli waris, janda masih berhak atas harta peninggalan suami sebagai jaminan hidupnya. Setidak-tidaknya kehidupan janda menjadi tanggung jawab anak-anaknya yang menerima warisan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 10  
MACAM AHLI WARIS (N = 68)

No	Ahli Waris	f	%
1.	Anak	32	47,06
2.	Anak dan Istri	29	42,65
3.	Lain-lain	7	10,24
	Jumlah	68	100

Sumber : Data Primer, 2003

Data pada tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa 32 responden atau 47,06 persen menyatakan yang dimaksud ahli waris adalah anak, sedangkan 29 responden atau 42,65 persen menyatakan yang dimaksud ahli waris adalah anak dan janda. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960 yang sudah

berjalan 30 tahun, belum mampu menggeser sebagian pandangan masyarakat tentang janda bukan sebagai ahli waris.

Walaupun janda bukan ahli waris, janda tidak dengan sendirinya tersingkir dari kehidupan keluarga, tetapi masih berhak menguasai harta yang ada dalam keluarga itu. Penguasaan harta tersebut untuk kehidupan dirinya (janda), apabila tidak mempunyai anak. Sedangkan apabila ada anak, penguasaan harta itu untuk kepentingan dirinya (janda) dan anak-anaknya. Disamping itu pada saatnya berdasarkan hak penguasaan itu, janda dapat membagi-bagikan harta tersebut kepada anak-anaknya.

Dengan demikian, janda (orang tua yang hidup terlama) yang bukan ahli waris adalah didasarkan kepentingan pribadinya melainkan lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau anak-anaknya. Disamping itu, walaupun janda bukan ahli waris akan tetap terjamin hidupnya, bahkan sering terjadi pula bahwa selama janda masih hidup, anak-anak tidak melakukan pembagian harta warisan ayahnya.

Namun dalam keadaan-keadaan tertentu suami sebelum meninggal memberikan warisan kepada istrinya. Pemberian ini didasarkan karena istri bukan ahli waris, sehingga timbul kekawatiran suami tentang jaminan kehidupan istrinya, setelah pewaris meninggal dunia. Kekawatiran timbul karena tidak ada harta asal istri, tidak mempunyai harta bersama yang ada harta asal suami dan tidak ada anak, atau sifat kedurhakaan dari anak yang mengakibatkan ibunya



tetap hidup terlantar. Dengan bagian harta warisan yang diterima oleh janda, akan mampu untuk membiayai hidupnya, biaya perawatan apabila ia sakit dan bahkan untuk biaya kematian. Sehingga demikian pewaris tidak merasa berdosa terhadap istrinya, yang telah ikut membina dan menata kehidupan rumah tangganya bersama-sama bahkan ikut pula mengumpulkan atau menciptakan harta bersama.

Janda sebagai ahli waris ditemukan juga pada masyarakat desa di kabupaten Karanganyar (tabel 10), walaupun jumlahnya menempati urutan kedua setelah anak (29 responden atau 42,65 persen). Bagian harta warisan yang diterimanya adalah sama dengan Bagian Anak-Anaknya. Dengan Demikian Apa Yang Berlaku Dalam Masyarakat, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 110K? Sip/ 1960. Hukum adat dalam yurisprudensi ini merupakan hukum adat tradisional yang telah berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pembagian harta warisan dengan memakai asas kerukunan ini merupakan ukuran yang ideal dalam hubungan sosial yang berarti serasi, kerja sama.

Dengan demikian penggunaan asas kerukunan dan kesamaan hak dalam pembagian harta warisan perlu diperlakukan rasa adil dengan memperhatikan keadaan masing-masing ahli waris. Sehingga tetap dipertahankan hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam menikmati dan memanfaatkan serta menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Dengan berpangkal tolak dari sila-sila

Pancasila maka dalam hukum waris adat bangsa Indonesia, bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kebersamaan hak dalam pewarisan juga terdapat asas-asas hukum, yaitu<sup>25</sup> :

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri, adalah merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk mengendalikan diri dalam masalah pewarisan.
- b. Asas Kesaamaan hak dan kebersamaan hak, adalah merupakan suatu asas untuk diperluakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam cara pembagian maupun cara pemanfaatan harta warisan, dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya kekurangan.
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan, adalah merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam penyelesaian masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.
- d. Asas Musyawarah dan mufakat adalah merupakan suatu asas yang dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota ahli waris mempunyai tanggung jawab yang sama atau hak dan kewajiban yang sama.

<sup>25</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- e. Asas Keadilan dan panerimo, adalah merupakan asas welaskasih terhadap para anggota keluarga pewaris, karena keadaan, kedudukan, jasa dan sejarahnya.

Asas-asas tersebut pada umumnya tampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi asas-asas tersebut juga berpengaruh dengan bidang-bidang Hukum Adat lain seperti Hukum Ketatanegaraan Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perjanjian Adat dan Hukum Pidana Adat.

Menurut seorang pemuka masyarakat di kabupaten Karanganyar tersebut, lembaga sepikul segendong bergeser menjadi asas kesamaan karena ada beberapa faktor yaitu :

- a. Pendidikan orang tua, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua maka akan semakin mengetahui adanya hakikat persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Pengaruh lingkungan daerah, kabupaten Karanganyar yang terletak di antara Surabaya, yang merupakan kota industri.
- c. Kemajuan tingkat peradaban manusia yang merupakan salah satu akibat proses modernisasi

Proses pembagian harta warisan menurut Hukum Islam hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan proses pewarisan yang terjadi. sebelum pewaris meninggal dunia hanya melalui hibah atau wasiat. Pemberian hibah dilakukan, apabila ada salah satu anak melangsungkan perkawinan atau akan melakukan usaha dagang. Hibah

ini dapat berupa sawah atau modal untuk berdagang dan akan diperhitungkan dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Masalah hibah ini hanya dijumpai 7 responden atau 5,83 persen dari 120 responden. Hibah dapat digunakan untuk memperlunak (menerobos) sistem Hukum Waris unilateral, di samping itu juga sering digunakan pada sistem Hukum Waris bilateral pada masyarakat Islam sebagai suatu cara untuk menghindarkan pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam masalah pembagian harta. Mengenai wasiat nampaknya tidak lagi menjadi model pembagian harta warisan untuk di masyarakat desa karanganyar desa dan hanya dijumpai 5 responden atau 4,17 persen yang akan melaksanakan wasiat. Namun demikian, dalam pelaksanaan wasiat sudah terpengaruh oleh hukum Islam yaitu adanya jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dan wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang berjasa bagi pewaris. Masalah hibah atau wasiat nampaknya sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat desa, karena masyarakat desa lebih suka melakukan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, atau pembagian harta warisan dilakukan oleh musyawarah ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

### **B.1.2. Penyelesaian Sengketa Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa di Kabupaten Karanganyar**

Pelaksanaan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia nampaknya dalam hal ini Kepala Desa memegang peranan penting dalam musyawarah para ahli waris. Kepala desa sebagai sesepuh desa merupakan orang yang sangat disegani oleh masyarakat desa. Fungsi Kepala Desa menjadi sangat penting, apabila dalam musyawarah pembagian harta warisan antara para ahli waris belum ada kesepakatan. Dalam menyelesaikan masalah ini, dari 9 responden Kepala Desa. 5 responden atau 55,55 persen menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembagian harta warisan akan dilakukan secara sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan 3 responden atau 33,33 persen akan membagi secara hukum Islam yaitu : bagian anak laki-laki 2 (dua) kali bagian anak perempuan. Namun 1 (satu) responden atau 11,11 persen menawarkan kepada ahli waris menghendaki hukum adat maka akan dibagi secara sama antara anak-laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan apabila ahli waris menghendaki hukum Islam untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, akan dibagi secara hukum Islam. Kepala Desa yang menyelesaikan masalah pembagian harta warisan adalah bertindak sebagai hakim perdamaian desa., Kepala Desa sebagai hakim perdamaian adalah merupakan salah satu tugasnya sebagai kepala rakyat yang memelihara dan menjaga agar supaya hukum itu berjalan dengan layak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hal-hal atau kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Dalam pelaksanaan pembagian warisan masih mengutamakan sifat kerukunan, proses pewarisan dalam masyarakat Jawa di kabupaten Karanganyar adalah berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia, sebagian besar perselisihan apabila pewaris meninggal dunia, dalam masyarakat desa di kabupaten Karanganyar masih dikenal adanya kesatuan pemilikan harta asal (bawaan) dan harta bersama. Sebagai komponen dari harta keluarga (harta warisan), kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada sebagian besar masyarakat desa di kabupaten Karanganyar adalah sama dalam pewarisan, janda pada masyarakat desa kabupaten Karanganyar sebagai ahli waris dan berhak untuk mewaris dari almarhum suaminya, kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat adalah bukan sebagai ahli waris, dan hanya mendapat pemberian dari orang tua angkatnya. Sedangkan besarnya pemberian tergantung pada lamanya seorang anak menjadi anak angkat. Hal ini berarti kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

- b. Peranan kepala desa sebagai penguasa tunggal masyarakat desa masih tetap menonjol baik sebagai hakim perdamaian desa maupun sebagai saksi dalam pembagian harta warisan yang disegani dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Penelitian-penelitian tentang Hukum Waris pada masyarakat adat di Jawa perlu ditingkatkan frekuensinya. Semakin banyak penelitian-penelitian yang dilakukan, maka akan diketemukan asas-asas atau prinsip-prinsip Hukum Waris Adat yang dapat diterima oleh masyarakat adat yang tidak saling bertentangan untuk menuju unifikasi hukum waris nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua, Transito, Bandung, 1984.
- Effendi Prangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Hazarin II, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cetakan Ketiga, Mas Indonesia, Jakarta.
- HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Aplikasi Teknisnya*, Uns Pers, Surakarta, 1999.
- Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1978.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ketut Artadi I, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Setiap Kawan, Denpasar, 1987.
- Koentjoroningrat, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua, Dian Karya, Jakarta, 1987.
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.
- Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua, Indonesia Hill Co, Jakarta, 1987.



- Moch. Koesnoe, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1979.
- Moch. Nasron, *Falsafah Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Moderis Zaini, *Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Bima Aksara, Jakarta, 1985.
- Muhammad Ali As-Shabum, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Cetakan Pertama, Diponegoro, Bandung, 1988.
- Muhammad Daud Ali H, *Asas-Asas Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- N-Z Ichtar Baru-Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia 7*, Jakarta, 1988.
- Retnowulan Sutanto, *Masalah-Masalah Hukum Waris Dewasa Ini*, Makalah Dalam Simposium Tentang Perkembangan Hukum Waris Dalam Era Pembangunan, Jakarta, 1989.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, Pendekatan Sosilologi terhadap Hukum, Bima Aksara, Jakarta, 1988.
- Soerojo Wignjodipuro I, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Cetakan Pertama, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*,
- Soebekti R, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1974.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Soeripto, *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 1979.

- Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1981.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Soeripto, *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 1979.
- Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sugangga, *Hukum Waris Adat*, CV. Sumber Karya, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Pioner Jaya, Bandung, 1987.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* Diterjemahkan Oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia* Djambatan, Jakarta, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Keenam, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Yahya Mansur H, *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, Cetakan Pertama, Pustaka Grafika Kita, Jakarta, 1988.